



RENCANA KERJA 2017



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PENGANTAR

Sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat, disusunlah Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Rencana Kerja ini mencakup materi yang menggambarkan evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2015 yang telah selesai dilaksanakan, *review* rancangan awal RKPD serta tujuan, sasaran dan seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2017. Rencana kerja ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut dan sebagai bahan informasi mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Semoga Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bermanfaat dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran SKPD lebih lanjut.

Padang, 2016

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT**

ZUL ALIMAN, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19590308 198110 1 001



DAFTAR ISI

BAB 1	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	2
	C. Maksud dan Tujuan	4
	D. Sistematika Penulisan	4
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD.....	6
	A. Evaluasi Pelaksanaan tahun 2015	6
	B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	38
	C. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	41
	D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	61
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	69
	A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	69
	B. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol	71
	C. Program dan Kegiatan Tahun 2017	72
BAB IV	Penutup	82

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana kerja (renja) dimaksudkan sebagai suatu dokumen perencanaan kerja dan anggaran dalam satu tahun yang memuat keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Badan Kesbangpol Prov. Sumbar) disertai sejumlah sasaran strategis yang harus dicapai dalam rangka mengemban misi serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Renja Badan Kesbangpol merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Renja Badan Kesbangpol juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015 yang merupakan dokumen 5 tahunan.

Sesuai dengan lampiran VI Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Provinsi Sumatera Barat, Renja Badan Kesbangpol disusun berdasarkan surat edaran Gubernur Sumatera Barat perihal penyampaian rancangan Renja SKPD. Surat edaran Gubernur tersebut dikeluarkan setelah pembahasan agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pelaksanaan forum RKPD dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda) RKPD. Rancangan Renja Badan Kesbangpol disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi melalui analisis gambaran pelayanan SKPD. Dalam rancangan Renja juga direview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD meliputi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta perumusan tujuan dan sasaran. Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran, dirumuskanlah kegiatan-kegiatan prioritas termasuk kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Rancangan Renja Badan Kesbangpol dibahas bersama Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sumbar untuk penyempurnaan. Setelah itu, rancangan Renja Badan Kesbangpol dibahas dalam Forum SKPD.

Rancangan Renja Badan Kesbangpol yang telah dibahas dan disempurnakan ditetapkan oleh Kepala Badan Kesbangpol dan disampaikan ke Bappeda untuk dijadikan bahan penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Renja Badan Kesbangpol tahun 2016 disusun dengan mengedepankan aspek prioritas terhadap program dan kegiatan yang menjadi urusan Badan Kesbangpol tahun kelima dari Renstra Badan Kesbangpol 2010 - 2015. Renstra Badan Kesbangpol 2010 - 2015 disusun untuk memenuhi target program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2010 - 2015 yakni pada prioritas 1 dan 2. Renja Badan Kesbangpol Tahun 2016 juga berbasiskan pada rencana program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan mengacu kepada sembilan agenda prioritas (Nawacita) RPJMN tahun 2015-2019.

Tahapan dan proses penyusunan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah berdasarkan Lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang dibuat oleh tim penyusun Renja SKPD.

Penyusunan Renja Badan Kesbangpol tentu saja tidak terlepas dari kerangka dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD. Namun hingga penyusunan Renja 2017, dokumen RPJMD 2016 - 2021 belum selesai disusun, sehingga RKPD dan Renstra SKPD juga belum dapat disusun. Karena itu, Renja Badan Kesbangpol Sumbar disusun berdasarkan RPJMD 2010 - 2015 dan Renstra SKPD 2010 - 2015 yang masih sangat substantif dan memiliki keterkaitan dengan Renja 2017.

Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2017 selanjutnya akan menjadi pedoman awal dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017. Renja Badan Kesbangpol Tahun 2017 merupakan rancangan awal perumusan program dan kegiatan tahunan SKPD yang akan dituangkan dalam rancangan Pra RKA dalam pembahasan lebih lanjut dalam Forum SKPD dan Musrenbang RKPD.

B. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 5) Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 8) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 10) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 11) TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
- 12) TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- 13) TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 18) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 19) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 23) Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 35 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar.
- 24) Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 50 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2010-2015.
- 25) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Standar Biaya APBD Tahun 2014
- 26) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- 27) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

C. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka satu tahun sesuai visi dan misi serta penetapan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumbar.

b) Tujuan

Tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar.



D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D. Review Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan terhadap kebijakan daerah
- B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan Tahun 2017

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

A. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih 2010 - 2015, sesuai dengan Renstra 2010 - 2015, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Renja 2015 memuat sejumlah rencana program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan tahunan

Renja Badan Kesbangpol Tahun 2015 disusun untuk memberikan fokus pada perencanaan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dan diajukan dalam rencana Kebijakan Umum dan Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2015. Setelah melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda) dan diskusi diskusi dalam forum SKPD serta penetapan KUA - PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, ditetapkanlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2015.

1. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2015

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
I	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			1.950.000.000
1	Penanganan masalah strategis daerah	Meningkatnya koordinasi dalam penanganan masalah strategis daerah.	12 kali rapat tim Kominda dan 1 kali rakor Kominda	250.000.000



2	Pengawasan orang asing	Meningkatnya pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing.	4 kali rapat tim	100.000.000
3	Bintek penanganan konflik	Meningkatnya pengetahuan aparaturnya tentang penanganan konflik	40 orang	100.000.000
4	Forum kewaspadaan dini masyarakat	Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat	6 kali rapat tim	100.000.000
5	Pelatihan Kominda	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparaturnya di bidang intelijen	40 orang	100.000.000
6	Penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Terlaksananya monitoring dan tersedianya data tentang gangguan keamanan	1 buah laporan	500.000.000
7	Sosialisasi penyaluran aspirasi dalam pembangunan demokrasi	Terlaksananya sosialisasi penyaluran aspirasi masyarakat yang tertib	1 kali	100.000.000
8	Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi	Meningkatnya koordinasi dalam mengevaluasi ketahanan ekonomi di kab/kota di Sumbar	19 kab/kota di Sumbar	100.000.000
9	Dukungan terhadap tim terpadu Inpres No 2 Tahun 2013	Terlaksananya dukungan terhadap tim terpadu Inpres No 2/2013	200 orang	200.000.000



10	Penanganan keamanan terhadap pelaksanaan pemilukada tahun 2015	Terlaksananya fasilitasi penanganan keamanan pemilukada tahun 2015	19 kab/kota	150.000.000
11	Sharing informasi tentang penanganan konflik di daerah	Terlaksananya sharing informasi tentang penanganan keamanan di daerah	1 kali	150.000.000
12	Sosialisasi Permendagri No. 7 Tahun 2011 tentang penerbitan rekomendasi ijin/penelitian	Terlaksananya sosialisasi permendagri No 7 tahun 2011 tentang penerbitan rekomendasi ijin/penelitian	1 kali	100.000.000
II	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			1.310.000.000
1	Sosialisasi penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi penanganan organisasi aliran kepercayaan	1 kali	100.000.000
2	Forum pemantapan wawasan kebangsaan	Meningkatnya pengetahuan aparaturnya dan masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan	50 orang	100.000.000
3	Sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa	Meningkatnya wawasan aparaturnya dalam rangka pemantapan ketahanan bangsa	50 orang	100.000.000



4	Pemeliharaan kerukunan umat dan pemberdayaan FKUB	Terlaksananya koordinasi antara aparaturnya dan pengurus FKUB dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama	1 kali	150.000.000
5	Peningkatan wawasan bela negara dan seminar bela negara	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bela negara	50 orang	100.000.000
6	Sosialisasi pewarisan nilai nilai luhur bangsa	Meningkatnya wawasan masyarakat tentang nilai luhur bangsa	50 orang	100.000.000
7	Penguatan forum pembauran kebangsaan	Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan dalam berbangsa	50 orang	120.000.000
8	Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan	Meningkatnya capaian program bidang ideologi dan wawasan kebangsaan	19 kab/kota	60.000.000
9	Penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat	90 orang	120.000.000
10	Sosialisasi SKB 3 Menteri dan Pergub Sumbar No. 17/2011 tentang larangan JAI	Meningkatnya pemahaman tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat tentang larangan JAI	50 orang	150.000.000



11	Sosialisasi wawasan kebangsaan melalui media massa, baliho, spanduk dan lainnya	Meningkatnya semangat wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat	1 kali	35.000.000
12	Seminar bela negara	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan generasi muda tentang bela negara	100 orang	175.000.000
III	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat			350.000.000
1	Pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Meningkatnya pengetahuan aparat dalam pencegahan dan peredaran gelap narkoba	40 orang	150.000.000
2	Pengawasan dan pemberantasan perbuatan maksiat	Meningkatnya koordinasi dan pengawasan terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat	40 orang	100.000.000
3	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2015 di Sumbar	Terselenggaranya peringatan HANI di Sumbar	1 kali	150.000.000
IV	Program pendidikan politik masyarakat			2.050.000.000
1	Forkomkon jajaran kesbangpol kab/kota di Sumbar	Meningkatnya persamaan persepsi langkah dan sikap segenap aparaturnya jajaran kesbangpol se-Sumbar	40 orang	150.000.000



2	Monitoring dan evaluasi program serta rapat kerja kesbangpol provinsi dan kab/kota	Meningkatnya kualitas kinerja di masa yang akan datang	19 kab/kota di Sumbar	200.000.000
3	Fasilitasi PAW anggota DPRD Kab/Kota di Sumbar	Terlaksananya fasilitasi PAW anggota DPRD kab/kota	Calon anggota DPRD kab/kota yang akan di PAW	100.000.000
4	Pengelolaan bantuan keuangan partai politik	Terlaksananya pengelolaan bantuan keuangan partai politik	1 kali	100.000.000
5	Bintek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan	Meningkatnya pemahaman anggota parpol dan aparatur tentang mekanisme pengajuan	1 kali	100.000.000
6	Sosialisasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya pengetahuan anggota ormas	40 org	100.000.000
7	Sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur di bidang politik	40 og	100.000.000
8	Dialog politik bersama partai politik, ormas dan tokoh masyarakat	Terwujudnya iklim kehidupan politik yang demokratis di Sumbar	200 org	100.000.000
9	Fasilitasi pemilukada 2015	Terselenggaranya pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilukada	14 daerah	750.000.000

Pada tahun 2015, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar memperoleh alokasi belanja tidak langsung sebesar **Rp 4.545.770.947,-** dan belanja langsung sebesar **Rp. 4.317.265.242,-**.

Realisasi keuangan pada akhir Desember 2015 untuk belanja tidak langsung adalah **Rp. 4.407.736.911 (96,96%)** dan belanja langsung sebesar **Rp. 4.000.113.880 (92,65%)**.

2. Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2011 s/d 2015.

No	Program/Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
I	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					
1	Penanganan masalah strategis daerah	12 rapat tim	12 rapat tim	12 rapat tim	12 rapat tim	4 rapat tim 4 rapat tim
2	Pengawasan orang asing	4 rapat tim	4 rapat tim	4 rapat tim	4 rapat tim	-
3	Bintek penanganan konflik	1 bintek	1 bintek	1 bintek	1 bintek	4 rapat tim
4	FKDM dan pembekalan FKDM	6 rapat tim	6 rapat tim	6 rapat tim	6 rapat tim	-
5	Pelatihan Kominda	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	-	-
6	Pelatihan Dasar Kemampuan Operasional Medan Terbuka	1 pelatihan	1 pelatihan	-	-	-
7	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	6 rapat tim	6 rapat tim	6 rapat tim	6 rapat tim	-
8	Pelatihan Teknis Implementasi Peraturan tentang Linmas	40 aparaturng dilatih	40 aparaturng dilatih	-	-	-
9	Sosialisasi upaya penertiban penyaluran aspirasi masyarakat	1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi	-

10	Fasilitasi peningkatan dan pengembangan peran aktif aparatur kab/kota dalam penegakan ketertiban	40 aparatur yg dilatih	40 aparatur yg dilatih	-	-	
11	Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi	19 kab/kota	19 kab/kota	19 kab/kota	19 kab/kota	19 kab/kota
12	Koordinasi Pembinaan Satuan Linmas Kabupaten/Kota	1 kali rakor	1 kali rakor	1 kali rakor	1 kali rakor	1 kali rakor
13	Inventarisasi Potensi Linmas	1 kali	1 kali	-	-	-
II	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
1	Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi
2	Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	50 aparatur dan masy. yg dibekali	50 aparatur dan masy. yg dibekali	50 aparatur dan masy. yg dibekali	50 aparatur dan masy. yg dibekali	70 pengurus OSIS
3	Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa	50 anggota ormas, generasi muda yg dibekali	50 anggota ormas, generasi muda yg dibekali	50 anggota ormas, generasi muda yg dibekali	50 anggota ormas, generasi muda yg dibekali	90 orang anggota ormas, LSM, parpol, generasi muda
4	Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	38 aparatur dan pengurus FKUB yang dibekali	38 aparatur dan pengurus FKUB yang dibekali	38 aparatur dan pengurus FKUB yang dibekali	38 aparatur dan pengurus FKUB yang dibekali	-



5	Rapat Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wasbang	-	50 aparaturnya di Sumbar yg mengikuti rakor	-	-	
6	Sosialisasi Pewarisan Nilai Nilai Luhur Bangsa	50 generasi muda yg mengikuti sosialisasi	40 generasi muda yg mengikuti sosialisasi	50 generasi muda yg mengikuti sosialisasi	60 generasi muda, ormas, parpol dan tokoh masy yg mengikuti sosialisasi	70 orang pengurus OSIS
7	Peningkatan Wawasan Bela Negara	50 org anggota ormas/ LSM dan generasi muda yg dibekali	50 org anggota ormas/ LSM dan generasi muda yg dibekali	50 org anggota ormas/ LSM dan generasi muda yg dibekali	50 org anggota ormas/ LSM dan generasi muda yg dibekali	70 orang generasi muda/ masyarakat
8	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wasbang	6 kab/kota	6 kab/kota	18 kab/kota	18 kab/kota	8 kab/kota
9	Inventarisasi dan Evaluasi Ketahanan Ideologi dan Wasbang	6 kab/kota	6 kab/kota	-	-	
10	Forum Pembauran Bangsa	-	-	1 forum	1 forum	-
11	Sosialisasi SKB 3 Menteri dan Pergub Sumbar No 17 tahun 2011	1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi
12	Rakor Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	-	-	1 kali	-	-
13	Pusat Pendidikan Kebangsaan	-	-	1 kali	1 kali	1 kali



III	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat					
1	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	38 aparatur yg dibekali	38 aparatur yg dibekali	38 aparatur yg dibekali	38 aparatur yg dibekali	45 aparatur
2	Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	40 aparatur	40 aparatur	40 aparatur	40 aparatur	57 anggota ormas
IV	Program Pendidikan Politik Masyarakat					
1	Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat	40 aparatur	40 aparatur	40 aparatur	40 aparatur	40 aparatur
2	Monitoring dan Evaluasi Program dan Rapat Kerja Kesbangpol	19 kab/kota	19 kab/kota	19 kab/kota	19 kab/kota	19 kab/kota
3	Fasilitasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat	13 kali sidang tim	17 kali sidang tim	15 kali sidang tim	10 kali sidang tim	8 kali Sidang tim
4	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	8 parpol	8 parpol	10 parpol	11 parpol	11 parpol
5	Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	40 aparatur yg dibekali	40 aparatur yg dibekali	40 aparatur yg dibekali	40 aparatur yg dibekali	40 aparatur dan pimpinan parpol
6	Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Ormas/LSM sesuai UU Keormasan	1 buku pendataan ormas	1 buku pendataan ormas	1 buku pendataan ormas	1 buku pendataan ormas	-

7	Sosialisasi Undang Undang dan Peraturan Tentang Politik	40 aparat, anggota ormas, parpol yg dibekali	40 aparat, anggota ormas, parpol yg dibekali	40 aparat, anggota ormas, parpol yg dibekali	40 aparat, anggota ormas, parpol yg dibekali	50 aparat
8	Verifikasi Bantuan Hibah Bagi Ormas Yang Bersumber dari APBD	-	50 ormas	-	-	-
9	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada					
10	Dialog Politik Bagi Tokoh Masyarakat, Anggota Ormas dan Partai Politik	-	-	4 kab/kota	6 kab/kota	4 kab/kota

3. Perkiraan Capaian Target Kinerja Tahun 2016.

Jika melihat target program dan kegiatan tahun 2016 yang tercantum dalam Renja Badan Kesbangpol Tahun 2016, maka diperkirakan target target tersebut dapat dicapai sebagian besarnya, mengingat tidak semua rencana kegiatan yang diusulkan dalam Renstra ditampung dalam APBD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2016.

a) Target target kegiatan yang diperkirakan dapat dicapai, yang melebihi target, atau kurang dari target Renstra 2010 - 2015.

Sehubungan dengan belum disusunnya Renstra SKPD 2016 - 2021 saat penyusunan Renja SKPD Tahun 2017, maka tidak bisa dilakukan perkiraan capaian target kinerja Renja 2016 dengan target Renstra 2016 - 2021.

b) Target target kegiatan kegiatan yang tidak dapat dicapai

Setelah ditetapkannya KUA - PPAS Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2016, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah menyusun DPA SKPD Tahun 2016 dan siap melaksanakan program dan kegiatan yang ada. Namun, sehubungan dengan belum ditetapkannya Renstra SKPD 2016 - 2021, maka Badan Kesbangpol juga belum bisa melakukan perkiraan target target

kegiatan Renja 2016 yang tak dapat dicapai dengan target kegiatan yang ada pada Renstra.

- c) Kegiatan kegiatan yang tidak ada dalam usulan Renstra 2016 - 2021, namun masuk dalam DPA Badan Kesbangpol tahun 2016 untuk menunjang pencapaian target kinerja renstra.

Sehubungan dengan belum disusunnya Renstra SKPD 2016 - 2021, maka juga tidak dapat dilakukan pendataan kegiatan yang tidak ada dalam usulan Renstra 2016 - 2021 yang tidak masuk dalam DPA Badan Kesbangpol Tahun 2016.

- d) **Perkiraan capaian Renstra 2016 -2021 tahun pertama.**

Ketika penyusunan Renja SKPD 2017 dilakukan, dokumen Renstra SKPD 2016-2020 belum selesai disusun karena masih menunggu rancangan RPJMD 2016-2020 dari Bappeda, yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan, mengingat baru dilantiknya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih pada tanggal 13 Februari 2016 lalu. Oleh karena itu, belum dapat dilakukan perkiraan capaian target Renstra 2016 - 2021 tahun pertama.

4. **Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol tahun 2015 dengan rencana capaian target Renstra tahun 2016.**

No	Program/Kegiatan	Capaian Renja Tahun 2015	Perkiraan Capaian Target Renstra 2016	Keterangan
I	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			
1	Penanganan masalah strategis daerah	5 kali rapat tim Kominda dan 1 kali rakor	-	
2	Pengawasan orang asing	4 kali rapat tim pengawasan orang asing	-	
3	Monitoring penanganan konflik	1 laporan monitoring penanganan konflik	-	



4	Forum kewaspadaan dini masyarakat	1 kali pembekalan FKDM	-	
5	Penanganan gangguan keamanan dalam negeri	1 rencana aksi	-	
6	Sosialisasi Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang penerbitan rekomendasi penelitian	40 aparatur dan yang mengikuti sosialisasi	-	
7	Fasilitasi dan sosialisasi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	30 orang tokoh masyarakat yang diberi pembekalan	-	
8	Rapat monitoring dan Evaluasi ketahanan ekonomi	50 orang aparatur yang mengikuti rapat koordinasi	-	
II	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			
1	Sosialisasi dan penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat	50 orang aparatur, tokoh masyarakat, tokoh agama yg mengikuti sosialisasi	-	
2	Forum pemantapan wawasan kebangsaan	50 orang tokoh agama, masyarakat, ormas, parpol dan generasi muda yang mengikuti forum	-	
3	Sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa	90 anggota ormas/LSM, generasi muda yg mengikuti sosialisasi	-	



4	Pemeliharaan kerukunan umat dan pemberdayaan FKUB	50 orang aparatur dan pengurus FKUB yg mengikuti pembekalan	-	
5	Peningkatan wawasan bela negara	70 mahasiswa/ siswa yg mengikuti pembekalan	-	
6	Sosialisasi pewarisan nilai luhur bangsa	70 orang pengurus OSIS SMU/SMK yang mengikuti sosialisasi	-	
7	Penguatan forum pembauran kebangsaan	45 orang etnis/paguyuban yg mengikuti forum pembauran	-	
8	Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wasbang	19 kab/kota yg diberikan pembinaan	-	
9	Penguatan pusat pendidikan kebangsaan	75 orang pengurus OSIS SMU/SMK yg mengikuti sosialisasi	-	
10	Seminar bela negara	100 orang anggota ormas, tokoh masyarakat, parpol dan generasi muda yang mengikuti seminar	-	
III	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat			
1	Pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	45 orang aparatur yg mengikuti pembekalan	-	
2	Pengawasan dan pencegahan pemberantasan maksiat	57 orang aparatur yg mengikuti pembekalan	-	

IV	Program Pendidikan Politik Masyarakat			
1	Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota	40 orang aparatur yg mengikuti forkomkon	-	
2	Monitoring dan evaluasi program kesbangpol	1 buah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan	-	
3	Fasilitasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota	4 kali sidang tim	-	
4	Pengelolaan bantuan Keuangan Partai Politik	11 parpol yg mendapat bantuan keuangan	-	
5	Bintek pengajuan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik	40 orang pimpinan parpol dan aparatur yg mengikuti bintek	-	
6	Fasilitasi Pemilu/Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada	2 kali rapat pembahasan		
7	Sosialisasi dan Pembinaan Ormas/Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Ormas/LSM Sesuai UU Keormasan	50 orang anggota ormas yg mengikuti sosialisasi	-	
8	Sosialisasi Undang Undang dan Peraturan Bidang Politik	50 orang aparatur provinsi dan kab/kota yg mengikuti sosialisasi	-	

5. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dalam Renja 2015

Dari 37 kegiatan urusan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2015, 32 kegiatan telah diakomodir pada APBD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2015 dan telah dilaksanakan sesuai dengan target/melebihi target yang

ditetapkan. Sedangkan 5 kegiatan yang tidak tertampung dalam APBD (tidak memenuhi target kinerja Renja 2015) adalah :

a) Penanganan keamanan terhadap pelaksanaan pemilukada tahun 2015.

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada tahun 2015 dalam bentuk pemantauan pelaksanaan pemilukada 2015 yang berlangsung serentak, untuk mewujudkan stabilitas keamanan lingkungan jelang, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemilukada tahun 2015. Rencana alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Namun karena keterbatasan keuangan daerah, kegiatan ini tidak terakomodir dalam APBD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2015.

b) *Sharing* informasi tentang penanganan konflik di daerah.

Kegiatan ini direncanakan dalam bentuk pertemuan dan diskusi fokus antar instansi terkait yang menangani konflik di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kegiatan ini tidak diakomodir dalam APBD tahun 2014 dikarenakan keterbatasan keuangan daerah.

c) Sosialisasi wawasan kebangsaan melalui media massa, baliho, spanduk dan lainnya.

Untuk menanamkan ideologi dan rasa kebangsaan yang kuat pada masyarakat khususnya generasi muda, Badan Kesbangpol memandang sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk iklan melalui berbagai media cetak dan media massa merupakan strategi yang patut dicoba. Rencana alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kegiatan ini tidak terakomodir dalam APBD Tahun 2015.

d) Sosialisasi undang undang No 17 tahun 2013 tentang ormas.

Kegiatan ini direncanakan dalam bentuk 1 kali sosialisasi bagi 40 orang aparatur bidang politik dalam negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Kegiatan ini tidak diakomodir dalam APBD Tahun 2015.

6. Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja dalam Renja 2015

6.1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a) Penanganan masalah strategis daerah

Kegiatan ini terakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 210.826.250,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dalam bentuk 5 kali rapat tim dan 1 kali rakor.

b) Pengawasan orang asing

Kegiatan ini terakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.760.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan terlaksana dalam bentuk 4 kali rapat tim serta pemantauan keberadaan orang asing didaerah sesuai dengan target.

c) Bimbingan teknis penanganan konflik

Kegiatan ini terakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.500.000 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),- dan telah terlaksana pada tahun 2015 dalam bentuk 1 kali bimbingan teknis bagi aparatur.

d) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Kegiatan ini terakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 115.876.250,- dan telah terlaksana pada tahun 2015 dalam bentuk 6 kali rapat tim FKDM dan 1 kali koordinasi antar aparatur kesbangpol kab/kota dengan FKDM kab/kota di Sumbar.

e) Rapat monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi di Sumbar

Kegiatan ini terakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.942.500,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan telah terlaksana pada tahun 2015 dalam bentuk 1 kali rapat koordinasi ketahanan ekonomi serta monitoring ke kab/kota di Sumbar.

f) Penanganan gangguan keamanan dalam negeri

Kegiatan ini terakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Tahun 2015 dan mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 284.601.200,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus seribu dua ratus rupiah), dan telah telaksana sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu berupa monitoring ke kab/kota

di Sumbar dan dihasilkannya tiga buah dokumen rencana aksi setiap empat bulan.

g) Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan kesbangpol

Kegiatan ini terakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.876.250,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan telah terlaksana dalam bentuk 1 kali sosialisasi bagi 40 orang aparatur kesbangpol kab/kota sesuai dengan target yang ditetapkan.

h) Sosialisasi SKB 3 Menteri dan Keputusan Gubernur Sumbar No. 17/2011 tentang larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Kegiatan ini terakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.803.600,- (empat puluh satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah), dan telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu berupa 1 kali sosialisasi.

6.2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a) Sosialisasi dan penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 67.038.650,- (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan terlaksana pada tahun 2015 dalam bentuk 1 kali sosialisasi tentang cara cara penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat.

b) Forum pemantapan wawasan kebangsaan

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 49.159.300,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) dan telah terlaksana dalam bentuk 1 kali pembekalan wawasan kebangsaan bagi 70 orang generasi muda.

c) Sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 62.016.250 (enam puluh dua juta enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan telah terlaksana pada tahun 2015 dalam bentuk 1 kali sosialisasi bagi 90 orang generasi muda.

d) Pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan FKUB

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 68.597.450,- (enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima

puluh rupiah) dan telah terlaksana pada tahun 2015 dalam bentuk rapat koordinasi bagi 50 orang aparatur dan pengurus FKUB.

e) Peningkatan wawasan bela negara

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 312.778.950,- (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan telah terlaksana pada tahun 2015 dalam bentuk pembekalan dan seminar bagi 170 orang anggota parpol, ormas dan generasi muda.

f) Sosialisasi pewarisan nilai luhur bangsa

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 52.604.550,- (Lima puluh dua juta enam ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan telah terlaksana dalam bentuk 1 kali sosialisasi bagi 70 orang masyarakat dan generasi muda.

g) Penguatan forum pembauran kebangsaan

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 60.386.750,- (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan telah terlaksana dalam bentuk 1 kali penguatan forum pembauran kebangsaan bagi 45 orang aparatur kab/kota.

h) Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 40.769.300,- (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan telah terlaksana dalam bentuk pemantauan ke 19 kab/kota di Sumatera Barat

i) Penguatan pusat pendidikan kebangsaan

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 55.246.250,- (lima puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan telah terlaksana dalam bentuk 1 kali sosialisasi penguatan pusat pendidikan kebangsaan.

6.3 Pogram Pendidikan Politik Masyarakat

a) Forkomkon jajaran kesbangpol kab/kota di Sumbar

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 29.340.125,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima

rupiah) dan telah terlaksana dalam bentuk 1 kali rapat koordinasi bagi 40 orang aparatur kesbangpol kab/kota.

b) Monitoring dan evaluasi program serta rapat kerja kesbangpol

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 115.092.880,- (seratus lima belas juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan terlaksana dalam bentuk monitoring serta evaluasi program kerja ke 19 kab/kota se-Sumatera Barat..

c) Fasilitasi PAW anggota DPRD kabupaten/kota

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan terlaksana dalam bentuk 4 kali sidang tim (pemberkasan dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD kab/kota)

d) Pengelolaan bantuan keuangan partai politik

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 58.160.000,- (lima puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan terlaksana dalam bentuk 12 kali rapat dalam rangka penelitian persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik bagi 10 partai politik yang mendapat kursi di DPRD

e) Bintek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 74.469.250,- (tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan terlaksana dalam bentuk 1 kali bimbingan teknis bagi para pimpinan partai politik dan aparatur kesbangpol kab/kota di Sumbar.

f) Sosialisasi dan pembinaan ormas

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 70.286.250,- (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan terlaksana dalam bentuk 1 kali sosialisasi bagi 50 orang anggota aparatur.

g) Sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan telah terlaksana dalam bentuk 1 kali sosialisasi bagi 50 orang aparatur.

h) Dialog politik bersama partai politik, ormas dan tokoh masyarakat.

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 309.119.495,- (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan terlaksana dalam bentuk 4 kali sosialisasi (4 angkatan) bagi 600 orang anggota parpol, ormas dan tokoh masyarakat di 4 kab/kota.

i) Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilu

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 309.119.495,- (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan terlaksana dalam bentuk koordinasi dan monitoring pemantauan tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak di 13 kabupaten/kota di Sumbar.

6.4 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat**a) Pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba**

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 55.961.200,- (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan telah dilaksanakan dalam bentuk 1 kali pembekalan penanggulangan bagi 45 orang aparaturnya.

b) Pengawasan dan pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat.

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 48.580.800,- (empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan terlaksana dalam bentuk 1 kali pembekalan bagi 57 orang aparaturnya.

7. Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja Renja 2015

Untuk tahun 2015, tidak ada kegiatan yang capaian target kinerjanya melebihi dari target kinerja yang direncanakan.

8. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra SKPD 2010 - 2015

Berdasarkan RPJMD pemerintah provinsi Sumatera Barat tahun 2010 - 2015, disusunlah Renstra SKPD 2010 - 2015. Program program kerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar berdasarkan Renstra SKPD 2010 - 2015 adalah :

Target Kinerja Program			

No.	Program Strategis	Indikator Kinerja Outcome					
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan	75%	80%	85%	90%	95%
2	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah aparatur kesbang kabupaten/kota	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org
3	Pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan wawasan dan pengetahuan politik masyarakat	75%	80%	85%	90%	90%
4	Peningkatan pemberantasan maksiat	Persentase penurunan pelanggaran perbuatan maksiat	20%	20%	20%	20%	20%

Implikasi yang timbul terhadap capaian program tahun kelima dalam Renstra 2010 - 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) **Capaian program Renstra SKPD 2010 - 2015 bidang keamanan dan kenyamanan lingkungan tahun 2015.**

Sepanjang tahun 2015, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dalam rangka mendukung stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah :

- Melakukan 5 kali rapat tim bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yaitu : Kepolisian Daerah RI (Polda), Komando Resor Militer (Korem), Kejaksaan Tinggi (Kejati), Badan Intelijen Negara Daerah Sumbar (BIN Daerah Sumbar), Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal II), Pangkalan Udara (Lanud) Tabing, Kanwil Kehakiman Hukum dan HAM, Imigrasi Padang, dan Ditjen Pajak Sumbar dan Jambi, membahas isu dan masalah strategis di Sumatera Barat diantaranya :
 - Perkembangan masalah pemilukada 2015
 - Konflik internal partai Golkar dan PPP
 - Isu beras mengandung biji plastik
 - Dampak kenaikan harga serta persediaan bahan pokok jelang bulan suci Ramadhan
- Melakukan rapat tim pengawasan orang asing bersama unsur Forkopimda dengan isu yang dibahas sebagai berikut :
 - Ada kabupaten/kota yang belum membentuk tim koordinasi pengawasan dan pemantauan orang asing, NGO dan lembaga asing di daerah.
 - Tim pengawasan orang asing di daerah tidak memiliki wewenang untuk mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan orang asing di Sumatera Barat, dikarenakan kebijakan otonomi daerah.
 - Terlambatnya laporan dan data yang berkaitan dengan orang asing, NGO dan lembaga asing di daerah.
- Melakukan monitoring penanganan konflik ke kabupaten/kota di Sumbar. Hasil monitoring yang cukup menonjol diantaranya :
 - Adanya gugatan oleh salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati terkait hasil pemilukada kabupaten Pasaman Barat yang dimenangkan oleh Drs. Baharuddin R dan Syahrul Dt. Marajo.
 - Adanya konflik internal dalam tubuh partai PPRN Pasaman Barat dimana terjadi dualisme kepengurusan.
 - Sejumlah konflik lahan di kabupaten Solok Selatan yang disebabkan oleh tidak jelasnya legalitas kepemilikan lahan dan konflik pertambangan.
- Melakukan pembekalan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat bagi pengurus FKDM provinsi
- Membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial tahun 2015 sesuai Keputusan Gubernur Sumbar No. 700-229-2015. Tim terpadu penanganan konflik sosial telah melakukan :
 - Koordinasi, arahan, pengendalian dan pengawasan aktivitas penanganan konflik sosial
 - Melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan di Sumbar
 - Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan di Sumbar
 - Merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan gangguan keamanan

- Memberikan supervisi, asistensi dan dukungan yang diperlukan oleh daerah
 - Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kejadian konflik sosial dan perkembangannya.
 - Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Melakukan 1 kali Sosialisasi Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian.
 - Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Secara keseluruhan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan tim Kominda Sumbar dan hasil rapat rapat disimpulkan bahwa :

- Kondisi keamanan di Sumatera Barat relatif terkendali, dengan peningkatan pemantauan situasi menjelang pemilukada serentak tahun 2015..
- Pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan secara maksimal disebabkan oleh terbatasnya wewenang tim pengawasan orang asing.
- Tercatat 23 konflik sosial yang terjadi sepanjang tahun 2015.

Jika dikaitkan dengan capaian program Renstra 2010 -2015, untuk tahun 2015, capaian program keamanan dan kenyamanan lingkungan ditargetkan mencapai 90%. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kondisi keamanan Sumatera Barat yang relatif kondusif, capaian program keamanan dan kenyamanan lingkungan pada tahun 2015 telah memenuhi target. Kendati alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan tahun 2015 tidak terakomodir seluruhnya seperti yang direncanakan dalam DPA Badan Kesbangpol Sumbar Tahun 2015, sebagai berikut :

No	Rencana program/kegiatan sesuai dengan Renstra 2010 - 2015	Target Indikator Tahun 2015	Realisasi Indikator Tahun 2015	Alokasi Anggaran Renstra Tahun 2015	Realisasi Penganggaran APBD Tahun 2015
I	Program Peningkatan				

	Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
1	Penanganan masalah strategis daerah	12 kali rapat tim Kominda	5 kali rapat tim Kominda	320.000.000	210.826.250
2	Pengawasan orang asing	4 kali rapat tim	4 kali rapat tim	110.000.000	55.760.000
3	Manajemen penanganan konflik	40 aparatur	40 aparatur	110.000.000	55.500.000
4	Forum kewaspadaan dini masyarakat	6 kali rapat tim	6 kali rapat tim	110.000.000	115.876.250
5	Pelatihan Kominda	40 aparatur	40 aparatur	110.000.000	-
6	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi di Sumbar	19 kab/kota	19 kab/kota	90.000.000	47.942.500

b) Capaian program Renstra SKPD 2010 - 2015 bidang kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Sepanjang tahun 2015, rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memantapkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan ketahanan bangsa adalah :

- Melakukan 1 kali sosialisasi penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat bagi 40 orang aparatur tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas.
- Melakukan 1 kali pemantapan wawasan kebangsaan bagi 70 orang pengurus OSIS dan generasi muda.
- Melakukan 1 kali sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa bagi 90 orang dan generasi muda
- Melakukan 1 kali rapat koordinasi bagi 50 orang anggota dan pengurus forum kerukunan umat beragama (FKUB)
- Melakukan 1 kali pembekalan dan 1 kali seminar dalam rangka meningkatkan wawasan bela negara bagi 170 orang anggota ormas dan parpol serta generasi muda.
- Melakukan 1 kali sosialisasi pewarisan nilai nilai luhur bangsa bagi 70 generasi muda.
- Melakukan 3 kali rapat tim FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) dan 1 kali sosialisasi bagi 45 orang anggota FPK

- Melakukan koordinasi dan pembinaan ke 10 kabupaten kota di Sumatera Barat dalam rangka pemantapan pelaksanaan program program bidang ideologi dan wasbang di kabupaten/kota.
- Melakukan 3 kali rapat kelompok kerja penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan 1 kali sosialisasi bagi 75 orang anggota masyarakat.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan dan rapat rapat koordinasi yang dilakukan, disimpulkan bahwa :

- Di bidang ideologi telah terjadi pergeseran nilai nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat . Hal ini diantaranya ditandai dengan kurangnya antusiasme masyarakat dalam menyambut hari hari besar nasional seperti, minimnya pengibaran bendera merah putih di rumah rumah warga saat perayaan HUT RI tiap tiap tanggal 17 Agustus.
- Terdapat banyak ajaran menyimpang dari ajaran Islam oleh kelompok kelompok agama seperti Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Gerakan Fajar Nusantara, dan LDII.
- Terjadinya sejumlah reaksi penolakan atas berkembangnya kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Sumbar.
- Dibentuknya Forum Pembauran Kebangsaan berdasarkan Permendagri No. 34 tahun 2006 dan Surat Kementerian Dalam Negeri No. 200/888/SJ tanggal 20 Februari 2013. Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 200-295-2015 tanggal 9 April 2015 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumbar Nomor 200-123-2014 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Prov. Sumbar. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dibentuk karena adanya kekhawatiran akan perpecahan bangsa mengingat beragamnya latar belakang budaya, suku, agama dan perbedaan adat istiadat di tengah masyarakat Sumbar. Dari 19 kab/kota di Sumbar, FPK baru terbentuk di kota Padang, kab. Solok Selatan dan kab. Pasaman Barat. Sedangkan pada tahun 2015 telah terbentuk Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Solok.

Jika dikaitkan dengan capaian program Renstra 2010 -2015, untuk tahun 2015, capaian program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan telah mencapai 100%. Sesuai dengan perencanaan, Badan Kesbangpol Sumbar telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dalam upaya memantapkan ideologi dan ketahanan bangsa. Kendati ada kegiatan yang tidak dapat diakomodir dalam DPA tahun 2015, disebabkan karena terbatasnya alokasi anggaran, secara keseluruhan kegiatan yang mendukung pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan telah dilaksanakan.

No	Rencana program/kegiatan sesuai	Target Indikator	Realisasi Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Penganggaran
----	---------------------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------------



	dengan Renstra 2010 - 2015	Tahun 2015	Tahun 2015	Renstra Tahun 2015	APBD Tahun 2015
I	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				
1	Sosialisasi dan penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat.	1 kali sosialisasi	1 kali sosialisasi	130.000.000	67.038.650
2	Forum pemantapan wawasan kebangsaan	50 orang masyarakat	50 orang masyarakat	85.000.000	49.159.300
3	Sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa	50 orang masyarakat	50 orang masyarakat	85.000.000	62.016.250
4	Forum kerukunan umat beragama (FKUB)	38 orang aparatur dan pengurus FKUB	40 orang aparatur dan pengurus FKUB	130.000.000	68.597.450
5	Rapat koordinasi pemantapan ideologi dan wasbang	50 orang aparatur	-	85.000.000	-
6	Sosialisasi pewarisan nilai nilai luhur bangsa	50 orang generasi muda	70 orang generasi muda	90.000.000	52.604.550
7	Peningkatan wawasan bela negara	50 orang anggota ormas dan generasi muda	170 orang tokoh agama, masyarakat, ormas, parpol dan generasi muda	90.000.000	312.778.950
8	Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wasbang	6 kab/kota	18 kab/kota	50.000.000	40.769.300
9	Inventarisasi dan evaluasi ketahanan ideologi dan wasbang.	6 kab/kota	-	55.000.000	-
10	Forum pembauran bangsa	1 kali	1 kali sosialisasi bagi 45 orang FPK.	115.000.000	60.386.750

11	Sosialisasi SKB 3 Menteri dan Pergub Sumbar No. 17 tahun 2011	1 kali	-	160.000.000	41.803.600
12	Rakor pemeliharaan kerukunan umat beragama	1 kali	-	160.000.000	-

c) Capaian program Renstra SKPD 2010-2015 bidang pemberantasan penyakit masyarakat.

Kegiatan kegiatan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendukung capaian program bidang pemberantasan penyakit masyarakat adalah :

- Menyelenggarakan 1 kali pembekalan pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba bagi 45 orang aparaturnya kesbangpol kab/kota
- Menyelenggarakan 1 kali pembekalan pengawasan pemberantasan penyakit masyarakat bagi 57 orang aparaturnya
- Menyelenggarakan 1 kali rapat koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi se-Sumatera Barat
- Menyelenggarakan 1 kali sosialisasi penanganan aliran kepercayaan masyarakat
- Menyelenggarakan 1 kali rapat koordinasi antar forum kerukunan umat beragama di daerah.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2015, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Rapat koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi se-Sumatera Barat sesuai dengan Edaran Kementerian Dalam Negeri RI No. 500/4789/SJ tentang pemantapan ketahanan ekonomi di daerah. Berdasarkan hasil rapat diperoleh data dan informasi sebagai berikut :
 - di kabupaten/kota masalah harga sembako pada waktu tertentu memberatkan masyarakat, misal pada bulan Ramadhan dan memasuki Idul Fitri namun berangsur normal kembali setelah lebaran.
 - Harga jual gas LPG 3 kg di beberapa kab/kota jauh diatas HET (harga eceran tertinggi) yang disebabkan oleh pemerintah provinsi. Seharusnya bupati/walikota juga menetapkan HET ditingkat pangkalan dan agen.
- Kota Pariaman akhir akhir ini diresahkan oleh fenomena hiburan organ tunggal yang kerpak diselenggarakan hingga larut malam bahkan hingga subuh, diiringi dengan acara 'saweran' yang jelas merupakan pelanggaran Perda setempat.

- Penyalahgunaan narkoba telah merambah hampir ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan hingga pelosok nagari di Sumatera Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, hampir sekitar 70.000 masyarakat Sumbar terlibat penggunaan narkoba atau 48,5%-nya adalah generasi muda.
- Jumlah kasus maksiat berupa perjudian, konsumsi minuman keras, serta pornografi tahun 2015 sebanyak 149 kasus, dan jika dibandingkan dengan tahun 2014, kasus maksiat yang terdata adalah sebanyak 231 kasus.
- Di bidang sosial budaya juga terdapat persoalan-persoalan yang memerlukan perhatian seperti misalnya masalah batas wilayah antar nagari maupun antar kabupaten/kota di Sumatera Barat seperti masalah batas kabupaten Dharmasraya (Sumatera Barat) dengan kabupaten Bungo (Provinsi Jambi), perbatasan antara kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan lainnya.

Target kinerja program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat tahun 2015 sesuai dengan Renstra 2010-2015 adalah menurunnya perbuatan maksiat sebesar 20%. Sesuai dengan perencanaan, Badan Kesbangpol telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan untuk meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat serta memelihara kerukunan umat beragama di Sumatera Barat. Walaupun banyak terdapat potensi konflik bidang keagamaan serta persoalan-persoalan menyangkut kerukunan hidup umat beragama di Sumbar, namun secara keseluruhan kondisi kehidupan beragama di Sumbar relatif terkendali.

No	Rencana program/kegiatan sesuai dengan Renstra 2010 - 2015	Target Indikator Tahun 2015	Realisasi Indikator Tahun 2015	Alokasi Anggaran Renstra Tahun 2015	Realisasi Penganggaran APBD Tahun 2015
I	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat				
1	Pembekalan	1 kali	1 kali	130.000.000	55.961.200

	penanggulangan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	pembekalan	pembekalan		
2	Pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat	1 kali pembekalan	1 kali pembekalan	130.000.000	48.580.800

d) Capaian program Renstra SKPD 2010-2015 bidang pendidikan politik masyarakat.

Kegiatan kegiatan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendukung capaian program bidang fasilitasi dan pendidikan politik masyarakat tahun 2015 adalah :

- Membentuk tim peneliti berkas calon penggantian antar waktu (PAW) dengan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 200-32-2015 tanggal 26 Januari 2015 dan melakukan 11 kali sidang/rapat tim dalam rangka pelaksanaan fasilitasi PAW anggota DPRD kabupaten/kota.
- Membentuk tim peneliti persyaratan pengajuan bantuan keuangan partai politik dan melaksanakan 12 kali verifikasi persyaratan pengajuan bantuan keuangan partai politik.
- Melaksanakan 1 kali bimbingan teknis pengajuan bantuan keuangan partai politik bagi 75 orang pimpinan partai politik dan aparatur kesbangpol di Sumatera Barat.
- Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan tahapan pelaksanaan pemilukada serentak di Sumbar 2015, dengan membentuk Tim Verifikasi dan Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Nomor 120-186-2015 serta Tim Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada di Sumbar dengan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 220-136-2015.
- Melaksanakan 1 kali sosialisasi dan pembinaan bagi 50 orang aparatur di Sumatera Barat.
- Melaksanakan 1 kali sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik bagi 40 orang aparatur kesbangpol provinsi dan kab/kota di Sumatera barat.
- Melaksanakan 6 kali dialog politik dan sosialisasi bersama partai politik dan tokoh masyarakat bagi 600 orang anggota parpol, ormas dan tokoh masyarakat di kabupaten Sijunjung, Solok Selatan, 50 Kota, Padang Pariaman, Kota Payakumbuh dan kab. Solok.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2015, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Terlaksananya 11 kali PAW DPRD kab/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Telah diberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD provinsi Sumbar yaitu Partai Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, Nasdem, PDI Perjuangan, Hanura, PKB dan Partai Bulan Bintang. Bantuan keuangan yang telah diberikan adalah sebesar Rp. 1.187.648.030,- Sedangkan bantuan keuangan tidak dapat direalisasikan pada Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan dan Pembangunan karena kedua partai tersebut sedang menjalani proses hukum disebabkan adanya konflik kepengurusan.
- Dalam bimbingan teknis pengajuan bantuan keuangan partai politik, diberikan beberapa materi terkait tata cara pengajuan bantuan keuangan partai politik yaitu :
 - a) Permendagri No 77 tahun 2014 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan parpol.
 - b) PP No. 83 tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan parpol.
 - c) Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik oleh BPKP Prov. Sumbar
 - d) Mekanisme penganggaran dan pengajuan bantuan keuangan partai politik.
- Secara umum, pemilihan umum kepala daerah di 13 wilayah kabupaten/kota dan 1 provinsi berjalan dengan lancar. Pelaksanaan pemilu 2015 di Sumbar sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Partisipasi pemilih dalam pilukada kepala daerah 2015 adalah sebagai berikut :

DPT	: 3.545.076
Jumlah pemilih	: 2.079.063
Persentase	: 58,65%

Seluruh rangkaian kegiatan yang ada pada DPA Badan Kesbangpol Prov. Sumbar tahun 2015 telah dilaksanakan untuk mencapai target program urusan

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Renstra di tahun 2015 yaitu sebesar 95-100%.

Meski terdapat beberapa kegiatan pada Renja Tahun 2015 yang tidak terakomodir dalam APBD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2015, secara keseluruhan, target target program Renstra 2010 - 2015 di tahun 2015 dapat dicapai.

9. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Agar target yang dijabarkan perencanaan jangka menengah dalam Renja tahunan dan DPA SKPD dapat tercapai dengan maksimal, pada tahun 2016, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang. Penganggaran kegiatan pokok sebagaimana yang telah tercantum dalam Renstra 2010-2015 tetap dilanjutkan di tahun 2016, dan ada sejumlah kebijakan strategis yang diambil untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sumatera Barat, diantaranya :

- a) Merencanakan pelaksanaan tiga kali rapat kerja bidang kesatuan bangsa dan politik provinsi dan kab/kota, sebagai langkah teknis pembahasan program dan kegiatan strategis bidang kesbangpol pada pelaksanaan Forum Komunikasi dan Konsultasi Jajaran Kesbangpol yang diselenggarakan di awal triwulan pertama tahun anggaran. Rapat kerja jajaran kesbangpol se- Sumbar ini juga merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Merencanakan pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan bagi kepala kesbangpol kab/kota yang fokus pada arahan implementasi urusan pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- c) Mendukung terciptanya stabilitas daerah sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 6 Februari 2015 di pusat, dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran kesbangpol dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 300/969/SJ tanggal 24 Februari 2015 tentang Pemberdayaan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik di Daerah dalam rangka menjaga stabilitas daerah, maka Badan Kesbangpol kedepannya akan :

- Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan :
 - Rawan konflik sosial berlatar belakang sengketa lahan pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, sengketa daerah induk dan otonom baru, SARA, Pilkada;
 - Terorisme antara lain kelompok ISIS maupun radikal lainnya;
 - Penyakit masyarakat antara lain narkoba, prostitusi, miras;
 - Pengawasan orang/lembaga asing seperti pekerja *illegal*, manusia perahu serta;
 - Daerah rawan bencana.
 - Menerbitkan laporan harian yang berkaitan dengan aspek aspek diatas serta permasalahan permasalahan lain yang berpotensi menimbulkan instabilitas di daerah serta melaporkannya kepada Gubernur sebagai dasar pertimbangan kebijakan untuk membuat kebijakan.
 - Meminta kepada pemerintah kabupaten/kota menyampaikan informasi dan laporan kepada pemerintah Provinsi, dan laporan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Mengaktifkan Pusat Komunikas dan Informasi (Puskomin) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- d) Merencanakan pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI) Sumbar.
- e) Merencanakan fasilitasi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2016.
- f) Membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2015 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015.

Kegiatan penanganan gangguan keamanan dalam negeri meliputi pencegahan konflik sosial, penghentian konflik sosial dan pemulihan pasca konflik. Sejak tahun 2015, kegiatan ini telah dilimpahkan dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilaksanakan oleh badan/kantor Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Aspek, Fokus, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Yang Digunakan Untuk EKPOD, indikator kinerja pelayanan Badan Kesbangpol telah mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2008 tersebut.

Untuk tahun 2015, capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah sama dengan SPM, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aspek Daya Saing Daerah		
3. Iklim Berinvestasi		
Fokus	Indikator	Formula
Keamanan dan Ketertiban	b. Jumlah demo	Jumlah demo dalam 1 tahun.
Kemudahan perijinan	c. Lama proses perijinan	Rata rata lama proses perijinan (hari).

1. Fokus keamanan dan ketertiban

Untuk tahun 2015, jumlah demo/aksi unjuk rasa yang didata oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar sebagai hasil dari pemantauan situasi keamanan dan ketertiban di Sumatera Barat selama 1 tahun adalah sebanyak 7 kasus. Jumlah demo ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebanyak 63 kasus. Terjadi penurunan aksi demo dan unjuk rasa sebesar 81 %

2. Fokus kemudahan perijinan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Prov. Sumbar serta berpedoman pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Badan Kesbangpol Prov. Sumbar maka jenis perijinan yang diterbitkan oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah rekomendasi/ijin penelitian bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota Sumatera Barat.

Menurut SOP, lama waktu penerbitan ijin penelitian jika persyaratan dan berkas lengkap dapat diberikan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas hari) kerja. Namun realisasinya selama ini, Badan Kesbangpol Sumbar dapat memberikan rekomendasi/ijin penelitian dalam waktu 2 hari. Apabila peneliti berasal dari luar kota/luar propinsi, maka apabila persyaratannya lengkap, proses penerbitan rekomendasi dapat diberikan dalam 1 (satu) hari kerja hingga jam pelayanan tutup.

Dengan keluarnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Permendagri Nomor 64 tahun 2011 tentang pedoman penerbitan rekomendasi penelitian, ada beberapa pasal yang mengalami

penambahan. Diantara pasal yang ditambah yaitu pasal 10A, pasal 15A, dan pasal 18A, menerangkan bahwa :

- Penerbitan rekomendasi penelitian dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Dirjen Kesbangpol
- Peneliti wajib menyerahkan hasil penelitiannya pada SKPD yang menerbitkan rekomendasi penelitiannya paling lambat 6 bulan sejak rekomendasi penelitian
- Setiap peneliti mempunyai hak mendapat informasi yang akurat tentang tatacara penerbitan rekomendasi penelitian, mendapat pelayanan penerbitan rekomendasi penelitian sesuai aturan yang berlaku, dan memperoleh penjelasan dalam hal keterlambatan dan penolakan penerbitan rekomendasi/ijin penelitian.

Sepanjang tahun 2015 Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah menerbitkan sebanyak 1.095 rekomendasi/ijin penelitian bagi mahasiswa/masyarakat yang melakukan penelitian di wilayah Sumatera Barat. Lama penerbitan surat rekomendasi/ijin penelitian memakan waktu 1 hingga 3 hari jika persyaratan lengkap. Surat rekomendasi/ijin penelitian ditandatangani oleh Kepala Bidang Kewaspadaan atau oleh Sekretaris Badan Kesbangpol.

Kinerja Pelayanan Lain Yang Dilayani oleh Badan Kesbangpol Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 35 tahun 2013, Badan Kesbangpol Prov. Sumatera Barat melaksanakan kegiatan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Diantaranya adalah menerbitkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) terhadap ormas yang ada di Sumatera Barat (Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan), melakukan verifikasi terhadap pengajuan bantuan keuangan partai politik (Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik), dan menerbitkan Izin Penelitian bagi mahasiswa/masyarakat lokal maupun luar negeri serta lembaga pemelitan baik lokal maupun internasional yang melakukan penelitian di Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini terhadap dampak dan kemungkinan yang ditimbulkan dari penelitian tersebut.

Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah :

1. Pemberian rekomendasi dan pembuatan Berita Acara bagi anggota DPRD kabupaten/kota di Sumatera Barat yang akan diganti antar waktu. Kegiatan ini berdasarkan kepada PP Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. Badan Kesbangpol Prov. Sumbar akan memverifikasi berkas dan persyaratan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan membuat Berita Acara sebagai dasar penetapan penggantian antar waktu.

Anggota DPRD akan diganti antar waktu apabila : meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri dari partai politik.

2. Pemberian rekomendasi terhadap partai politik yang memperoleh bantuan keuangan dari APBD (partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Prov. Sumbar)

Kegiatan ini berdasarkan kepada PP Nomor 83 tahun 2012 tentang bantuan keuangan partai politik dan Permendagri Nomor 77 tahun 2014 tentang pedoman tata cara penghitungan penganggaran dalam APBD, tertib administrasi pengajuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan. Badan Kesbangpol melakukan verifikasi terhadap persyaratan administratif partai politik yang berhak mendapat bantuan keuangan dari APBD.

C. Isu Isu Strategis Terkait Fungsi Pelayanan SKPD

1. **Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol dan hal hal kritis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.**

- a) **Kedudukan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesbangpol Prov. Sumbar merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- b) **Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Sumatera Barat.

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;

- Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik dilingkungan provinsi dan kabupaten/kota;
- Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- Pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik ; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

c) Visi dan Misi

Visi

"TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT
SUMATERA BARAT YANG DEMOKRATIS,
BERBUDAYA, DINAMIS, BERSATU, TENTRAM, AMAN
DAN DAMAI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD

Untuk mendukung visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar sebagai berikut :

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.
- Mewujudkan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang nilai nilai wawasan kebangsaan
- Mewujudkan sistem politik yang demokratis dan beradab.
- Mewujudkan generasi muda dan masyarakat yang bebas dari maksiat dan narkoba.

d) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

➤ Tujuan

Pencapaian tujuan umum program dan kegiatan Badan Kesbangpol Prov. Sumatera Barat direncanakan dalam waktu 1

(satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan visi dan misi serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Secara spesifik, dan sesuai dengan kewenangan yang ada di provinsi maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
- Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya, suku, ras dan agama
- Tercapainya pembinaan politik dalam masyarakat
- Terciptanya upaya pemberantasan penyakit masyarakat

➤ Sasaran

Sasaran merupakanjabaran dari tujuan dengan indikator yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra 2010 -2015.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah :

- Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
- Meningkatnya pembauran kebangsaan dalam masyarakat dan generasi muda
- Sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik
- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penyakit masyarakat.

➤ Strategi

Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah merumuskan sejumlah strategi sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dan mengadakan forum pemantapan wawasan kebangsaan.
- Memberikan sosialisasi dalam rangka memperkuat rasa kebangsaan
- Memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai luhur bangsa.

- Melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan infra struktur politik di Sumatera Barat.
- Menyelenggarakan forum komunikasi di jajaran kesbangpol provinsi dan kab/kota.
- Mengadakan pembekalan bagi aparaturnya dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pencegahan dan pemberantasan maksiat.
- Melakukan rapat pembahasan dan sosialisasi peraturan dalam penanganan aliran keprcayaan masyarakat.
- Melakukan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi ke kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan pelatihan dalam rangka penanganan masalah strategis daerah.
- Membentuk tim pengawasan orang asing provinsi Sumatera Barat dan melakukan rapat pembahasan keberadaan orang asing.

➤ Kebijakan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat
- Memantapkan proses pembauran kebangsaan di segala aspek kehidupan
- Meningkatkan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya ekses dari keberadaan/kehadiran orang asing di Sumatera Barat
- Mendewasakan sikap dan prilaku masyarakat berdemokrasi yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman nilai nilai Pancasila
- Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan kontijensi serta mengatasi berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat.
- Mengembangkan sistem dan budaya politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infra struktur politik serta mantapnya interaksi antara infra dan supra struktur politik
- Mengembangkan pembinaan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan agama dalam kehidupan

- Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama agama
- Meningkatkan pengetahuan aparat, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Meningkatkan koordinasi dan pengawasan serta pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat.
- Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemantapan dan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang diakibatkan oleh gejolak ekonomi dalam kehidupan.

e) Sinergitas perencanaan/pelaksanaan program kerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan Kesbangpol Kab/Kota serta program kerja Kesbangpol Pusat.

No	Matrik Program/Kegiatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum	Program Kesbangpol Prov. Sumbar	Program Kesbangpol Kab/Kota	Ket
	Program pembinaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Dilaksanakan oleh semua kantor/badan kesbangpol di kab/kota kecuali



	Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas			kesbangpol Padang pariaman, Dharmasraya dan 50 Kota
	Fasilitasi Politik Dalam Negeri	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Dilaksanakan oleh semua kantor/badan kesbangpol kab/kota
	Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Dilaksanakan oleh semua kantor/badan kesbangpol kab/kota
			Program Pelaksanaan Pilkada	Kesbangpol Kab. Solok Selatan
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan	Kesbangpol Kab. Sijunjung, Kesbangpol



			Tindak Kriminal	Kab. Tanah Datar, Kesbangpol Kab. Pesisir Selatan, Kesbangpol kota Bukittinggi, Kesbangpol kota Payakumbuh, Kesbangpol kab. Pasaman Barat, Kesbangpol Kab. Mentawai
			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kesbangpol Kota Padang Panjang, Kesbangpol Kab. Pesisir Selatan, Kesbangpol Kota Solok
			Program dukungan penyelenggaraan Pemilu	Kesbangpol Kab. Tanah Datar
			Program pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal	Kesbangpol kota Pariaman, Kesbangpol Kota Solok
			Program peningkatan	Kesbangpol kab. Pasaman

			pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Barat
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Kesbangpol Kab. Kep. Mentawai
			Program dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilukada kota Sawahlunto	Kesbangpol Kota Sawahlunto

Melihat paparan tabel diatas, walaupun urusan kesbangpol di pusat dan daerah berada dalam lingkup yang sama, namun program program kerjanya belum sepenuhnya selaras dan sinergis. Kegiatan kegiatannya pun berbeda beda, sementara penanganan masalah kesbangpol di wilayah manapun memerlukan kesamaan langkah dan sikap dalam menanganinya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar di tahun 2016 akan melaksanakan Rapat Kerja antar Kesbangpol Provinsi dengan Kesbangpol Kab/Kota untuk mensinergikan sikap dan langkah langkah yang harus diambil dalam membuat kebijakan. Rapat kerja tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan di tahun tahun mendatang. Diharapkan di masa yang akan datang akan terwujud sinergitas di jajaran kesbangpol pusat, provinsi, kab/kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan di Sumatera Barat.

- f) **Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik didaerah pasca direvisinya undang undang tentang pemerintahan daerah.**

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur dan pembagian urusan khususnya pada bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang sebelumnya merupakan urusan wajib pemerintah daerah, kedepannya akan menjadi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dengan dibantu sebuah instansi vertikal, dengan pembiayaan dari APBN dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan umum mencakup:

- a. urusan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dalam rangka memantapkan penga,alan ajaran Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras an golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, HAM, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Menindaklanjuti pasal 25 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran Nomor 120/523/SJ tanggal 16 Januari 2015 yang diantaranya mengatakan bahwa sebelum terbentuknya instansi vertikal, maka urusan pemerintahan umum di

Sumatera Barat tersebut dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan atau biro/bagian pemerintahan.

Akan terjadi perubahan nomenklatur pada Badan Kesbangpol Provinsi maupun kabupaten/kota, menyesuaikan dengan isi Undang Undang No. 23 Tahun 2014 dimaksud, yang akan diatur lebih lanjut dalam sebuah Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Forkopimda. Hingga awal tahun 2016 ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemerintahan Umum dan Forkompimda tersebut masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian PAN dan RB.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

Persoalan persoalan aspek bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan permasalahan mendasar. Sebagai lembaga yang dituntut untuk mendukung terwujudnya stabilitas daerah terutama dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di era globalisasi ini, kesbangpol menghadapi permasalahan dan hambatan yang tidak ringan.

Selama ini, dalam implementasi otonomi daerah, secara umum masalah yang dihadapi kesbangpol adalah, persoalan persoalan bidang kesbangpol ditangani dengan versi masing masing dengan kebijakan daerah yang berbeda beda dan tergantung kemampuan APBD masing masing. Sementara, satuan kerja yang menangani urusan kesbangpol merupakan instansi yang memiliki peran dan fungsi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

HAMBATAN INTERNAL

- Berbeda bedanya visi dan misi antara Kesbangpol Provinsi dengan kesbangpol kabupaten/kota sehingga program programnya tidak fokus dalam penanganan masalah kesbangpol.
- Berbeda bedanya bentuk nomenklatur antara Kesbangpol provinsi dan kesbangpol kabupaten/kota. Misal, di kota Padang Panjang, kesbangpolnya hanya merupakan bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol, sehingga tidak mendapat alokasi dan prioritas anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya di daerah tersebut.

- Sangat kurangnya rasa kebersamaan antar kesbangpol di daerah maupun dengan kesbangpol di pusat, sehingga menimbulkan kurangnya sinergitas dalam menangani permasalahan kesbangpol.
- Belum semua Badan/Kantor Kesbangpol membentuk seluruh tim atau forum strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, tim Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Tim Pengawasan Orang Asing, tim Komunitas Intelijen Daerah dan yang terbaru Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.
- Kurangnya kegiatan kegiatan yang bersifat harmonisasi dan konsolidasi demokrasi secara sehat khususnya pasca reformasi dan pasca pemilu, dikarenakan keterbatasan peruntukan anggaran bagi Badan Kesbangpol dari APBD.

HAMBATAN EKSTERNAL

- **Aspek politik :**
 - Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi
 - Belum maksimalnya peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
 - Belum terciptanya etika dan budaya politik yang demokratis
 - Belum terwujudnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan.
- **Aspek Sosial**
 - Maraknya pola kebebasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi
 - Kurangnya kepedulian komponen terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparatur) dalam pemantapan wawasan kebangsaan
 - Kurangnya program program pembinaan karakter bangsa
 - Belum banyaknya program program pembangunan karakter bangsa yang dimasukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal
 - Tidak adanya pendidikan/penataran seperti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di sekolah sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya

- **Aspek Ekonomi :**
 - Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
 - Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalan sumber pendapatan asli daerah
 - Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
 - Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
 - Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.
 - Masih kurangnya sinergitas antara aparatur dan organisasi organisasi terkait dalam mengelola dan meredam permasalahan ekonomi yang timbul akibat adanya kebijakan kebijakan pemerintah pusat (misal, kenaikan harga BBM atau tarif dasar listrik)

- **Aspek Keamanan dan Ketentraman :**
 - Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
 - Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat sebagai antisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.
 - Belum sinergisnya aparatur dan tokoh tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial.
 - Belum berperan aktifnya aparatur, tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam upaya penanganan keamanan lingkungan.
 - Belum optimalnya peran forum forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional (SPM/MDG's)

a) Dampak terhadap capaian Misi 1 RPJMD 2010 - 2015

Melalui misi 1 RPJMD 2010 - 2015, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat menghendaki terwujudnya tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi *Kitabullah*. Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram melalui pengamalan ajaran agama dan adat istiadat.

Melalui program dan kegiatan tahunannya, Badan Kesbangpol fokus pada pencapaian sasaran misi 1 yaitu: a) Meningkatnya kerukunan umat beragama, dan b) Berkurangnya tingkat konflik dalam masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pada misi 1 tersebut, diperlukan strategi yang diimplementasikan dalam arah kebijakan. Arah kebijakan tersebut nantinya bermuara pada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol.

Hingga tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2010 - 2015 ini, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah mengerahkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada dalam menjalankan program dan kegiatan demi mencapai tujuan dari misi 1 tersebut. Berdasarkan target kinerja program yang ada dalam RPJMD 2010 - 2015, hingga periode kelima RPJMD ini, ditargetkan persentase penurunan pelanggaran/perbuatan maksiat sebanyak 20%.

Kegiatan kegiatan yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dari tahun 2010 hingga 2015 adalah berupa pembekalan pembekalan dalam rangka mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat berbahaya (narkoba), juga pembekalan dalam rangka mengawasi dan mengurangi pelanggaran/perbuatan maksiat. Badan Kesbangpol juga telah melakukan rapat rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya mencapai target.

Berdasarkan data yang diperoleh tahun 2015, dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis kasus	Tahun 2014	Tahun 2015	%
1	Jumlah kasus maksiat di Sumbar	231	149	
	Jumlah	231	149	135,5%

Sedangkan jumlah pemakai narkoba (pemakai/pengguna dan pengedar) di Sumatera Barat selama tahun 2015 adalah :

No	Jenis kasus	Tahun 2014	Tahun 2015	%
1	Penyalahgunaan narkoba	499	123	
	Jumlah	499	123	188,8%

Jika dilihat dari statistik diatas, maka capaian kinerja Badan Kesbangpol dalam mendukung misi 1 dalam RPJMD yaitu untuk pelanggaran kasus maksiat telah terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 135,5 % dari tahun 2014 ke tahun 2015. Dan untuk kasus penyalahgunaan narkoba, terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 188,8%.

b) Dampak terhadap capaian Misi 2 RPJMD 2010 - 2015

Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merupakan persyaratan yang sangat penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hingga periode kelima RPJMD 2010 - 2015 yaitu tahun 2015, telah dilaksanakan program keamanan dan kenyamanan lingkungan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan program pendidikan politik masyarakat dan kegiatan yang tercakup didalamnya, dengan mengerahkan segenap potensi, sumberdaya dan kemampuan anggaran yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan capaian program dan kegiatan tahun 2015 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2014	Target Tahun 2015	Ket
1	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan	90%	95%	
2	Aparatur kesbangpol kabupaten/kota yang diberikan pemahaman wawasan kebangsaan	40 orang	40 orang	
3	Persentase peningkatan wawasan dan pengetahuan politik	90%	90%	

Dari gambaran tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa indikator kinerja program keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk tahun 2015 adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat. Target persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan ini diperkirakan naik 5% dari tahun 2014 yaitu sebesar 95%.

Tolok ukur keberhasilan pencapaian program ini salah satunya adalah dengan berkurangnya kasus kasus kejahatan, kriminal, maksiat dan menurunnya jumlah konflik anarkis, yang dapat mengganggu rasa aman masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan lebih jauh lagi menimbulkan instabilitas didaerah.

1. Capaian target kinerja program bidang keamanan dan ketentraman masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dari hasil rapat rapat dengan tim Komunitas Intelijen Daerah, tim pengawasan orang asing yang terdiri dari Kepolisian Daerah RI wilayah Sumatera Barat, Korem 032 WBR, Lantamal II, Lanud, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kantor Imigrasi Padang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pusat Staistik Wilayah Sumatera Barat dan instansi lainnya, serta dari hasil pemantauan dan koordinasi dengan jajaran pemerintah kab/kota, diperoleh data sebagai berikut :

No	Jenis kasus	Tahun 2014	Tahun 2015	%
1	Kasus yang menonjol di Sumatera Barat.	9.177	8.067	127,51%
2	Konflik sosial	90	23	174,44%

Dari tabel tersebut diperoleh gambaran bahwa untuk kasus kasus pencurian, penipuan, judi, perkosaan dan lainnya dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan jumlah kasus sebanyak 1.110 kasus atau terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 127,51%. Sedangkan untuk

jumlah konflik sosial yang terjadi di wilayah Sumatera Barat pada tahun 2014 berjumlah 90 konflik yang terdata. Pada tahun 2015, jumlah konflik sosial yang terdata menurun menjadi sebanyak 23 kasus. Ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja sebanyak 174,44%, atau penurunan jumlah konflik sosial sebanyak 74,44%.

2. Capaian indikator program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

Target kinerja program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dalam RPJMD 2010 – 2015 untuk tahun 2015 dijabarkan sebagai berikut :

No	Target kinerja	Target tahun 2015	Capaian tahun 2015	%
1	Jumlah aparatur yang diberikan pemantapan wawasan kebangsaan.	40 orang	-	0

Sesuai dengan dokumen Renstra 2015 – 20110, target program yang direncanakan adalah memberikan pemahaman wawasan kebangsaan kepada aparatur kesbangpol se-Sumatera Barat dengan tujuan agar aparatur kesbangpol kab/kota dapat menyebarluaskan kepada masyarakatnya akan pentingnya semangat kebangsaan, ketahanan nasional, integrasi bangsa, ideologi, serta yang tak kalah penting dipahaminya NKRI, Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebagai empat konsensus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tahun 2015, ditargetkan sebanyak 40 orang aparatur kesbangpol telah mendapatkan pemahaman pemantapan wawasan kebangsaan. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa diberikan pada masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan pengurus OSIS SMU/SMK, juga pada sejumlah tokoh masyarakat, agama dan adat, sebagai berikut :

- Forum pemantapan wawasan kebangsaan bagi 70 orang pengurus OSIS SMU/SMK di Tanah Datar.
- Sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa bagi 90 orang tokoh masyarakat, agama, adat, ormas dan generasi muda di Dharmasraya.
- Peningkatan wawasan bela negara bagi 70 orang generasi muda di Solok Selatan dan seminar bela negara bagi 100 orang tokoh masyarakat, adat, agama, ormas, parpol, generasi mudadi Padang.
- Sosialisasi pewarisan nilai nilai luhur bangsa bagi 70 orang pengurus OSIS SMU/SMK di Sawahlunto.
- Penguatan forum pembauran kebangsaan bagi 45 orang anggota etnis/paguyuban di Bukittinggi
- Penguatan pusat pendidikan kebangsaan bagi 75 orang pengurus OSIS SMU/SMK di Agam.

Kedepannya, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar akan lebih fokus pada upaya pembekalan dan pemantapan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, semangat bela negara dan nilai luhur bangsa bagi murid murid sekolah (SMU/SMK), tokoh pemuda dan generasi muda, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat khususnya generasi muda dapat berperan aktif dalam upaya upaya penyebaran semangat kebangsaan dilingkungannya, dengan tujuan menjadikan generasi muda Sumatera Barat memiliki rasa cinta tanah air yang kuat.

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan tahun 2016 juga akan fokus pada pembauran kebangsaan dengan memberikan pemahaman dan pembinaan pada kelompok etnis/paguyuban kabupaten/kota, serta mengoptimalkan pembentukan forum pembauran kebangsaan bagi kabupaten/kota yang belum membentuk.

3. Capaian indikator program pendidikan politik masyarakat

Target tahun 2015 dalam RPJMD 2010 - 2015 bidang pendidikan politik masyarakat adalah meningkatnya persentase wawasan dan pengetahuan politik masyarakat adalah 90%. Namun capaian indikator program ini hanya 85% disebabkan oleh berbagai faktor.

Capaian target ini dapat digambarkan sebagai berikut :



No	Target kinerja	Target tahun 2015	Capaian tahun 2015	%
1	Peningkatan wawasan dan pengetahuan politik masyarakat	90%	85%	

Badan Kesbangpol Prov. Sumbar pada tahun 2015 telah melakukan dialog politik dengan 600 tokoh masyarakat, anggota partai politik, dan anggota ormas di 6 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam menghadapi pemilihan umum.

Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dengan DPT pada pemilukada tahun 2015, digambarkan sebagai berikut :

Jumlah DPT Pemilu Tahun 2014 : 3.622.465
Jumlah DPT Pemilu Tahun 2015 : 3.545.076

Partisipasi pemilih Sumbar tahun 2014 : 63,74 %
Partisipasi pemilih Sumbar tahun 2015 : 58,65 %

Dari gambaran diatas diperoleh data bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilu tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 5,09% jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 . Hal ini mendorong Badan Kesbangpol selaku instansi yang memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan dan kelancaran Pemilu di Sumatera Barat untuk lebih intensif lagi melaksanakan sosialisasi, pembinaan maupun dialog politik di kabupaten/kota dengan para tokoh masyarakat setempat, anggota partai politik, anggota ormas dan aparatur.

Dampak capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol berdasarkan SPM/IKU secara umum terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010 - 2015.

Jika melihat pada misi 1 Gubernur dan Wakil Gubernur dikaitkan dengan capaian IKU pada SPM, maka Badan Kesbangpol Prov. Sumbar fokus pada indikator jumlah demo (aksi unjuk rasa) selama setahun. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, sepanjang tahun 2015 terpantau 7 aksi unjuk rasa. Angka ini menunjukkan penurunan aksi demo dan peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun 2014. Berarti di tahun 2015, telah terjadi peningkatan kinerja berupa turunnya jumlah aksi demo sebesar 188,88%.

Hal ini didukung oleh banyak faktor diantaranya :

1. Forum forum yang dibentuk seperti FKDM, FKUB maupun Forum Pembauran Kebangsaan serta tim tim penanganan masalah strategis dan pengawasan orang asing telah semakin berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah deteksi dini dalam menyikapi kemungkinan persoalan persoalan yang akan mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Keberadaan Kominda di kabupaten/kota menunjukkan eksistensinya dan mampu makin optimal dalam berperan sebagai mata dan telinga pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan dan antisipasi permasalahan sedini mungkin.

c) Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Kinerja SKPD

Aspek Politik :

- Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik.
- Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
- Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah.
- Makin meningkatnya kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat.
- Berkembangnya partisipasi politik masyarakat.

Aspek Sosial Budaya :

- Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional.
- Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI.

- Makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*"
- Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- Makin meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
- Berkembangnya perguruan tinggi sebagai sumber penyerapan iptek.

Aspek Ekonomi :

- Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
- Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian daerah.
- Terbukanya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi.
- Kondisi geografis Sumatera Barat yang berbatasan dengan provinsi lain yang kaya sumber daya alam.
- Penduduk Sumatera Barat yang jumlahnya cukup besar, berpotensi sebagai tenaga kerja.

Aspek Keamanan/Ketentraman :

- Terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.
- Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
- Terakomodasinya potensi aparaturnya kesbangpol dan aparaturnya terkait dalam pembangunan demokrasi dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada awal tahun 2015 Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum akan melakukan penyusunan *road map*, pemetaan kebutuhan, pembagian tugas dan pembentukan tim Pokja dalam rangka pembentukan kelembagaan yang

melaksanakan urusan pemerintahan umum. Kemudian pada pertengahan hingga akhir tahun 2015 akan dilakukan penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri; pembentukan kelembagaan kesbangpol provinsi; dan pengajuan anggaran. Akhir 2016 ditargetkan operasional Kesbangpol Provinsi telah berjalan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan pada tahun 2017 direncanakan pembentukan kelembagaan kesbangpol kab/kota.

Badan Kesbangpol melihat perubahan nomenklatur ini sebagai peluang yang sangat strategis untuk semakin memantapkan peran dan fungsi kesbangpol dalam mendukung terciptanya stabilitas di daerah.

d) Rekomendasi pengambilan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan strategis tahun 2017.

- Badan Kesbangpol Sumbar merumuskan program dan kegiatan tahun 2016 berpedoman kepada prioritas 1 dan prioritas 2 RPJMD 2010 - 2015 dengan memperhatikan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) RPJMN Tahun 2015 - 2019 khususnya agenda 2 dan agenda 9.
- Perumusan program dan kegiatan tahun 2017 juga memperhatikan : 1) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014; 2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor RI Nomor 300/969/SJ tentang pemberdayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah dalam rangka menjaga stabilitas daerah.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

a) Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Tidak dapat dipungkiri, kondisi kemajemukan masyarakat Sumatera Barat yang terdiri dari banyak suku, ras, adat dan agama yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu gesekan gesekan yang tentu saja tidak diinginkan. Juga banyaknya persoalan tanah ulayat, wilayah perbatasan antar kabupaten/kota maupun antar provinsi yang dapat memicu persoalan. Hal-hal ini -mau tidak mau- membuat Badan Kesbangpol berupaya untuk selalu melakukan reposisi dan reorientasi terhadap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan.

Hingga pada tahap penyusunan Renja SKPD Tahun 2017, RPJMD 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan

Wakil Gubernur Tahun 2016 masih dalam tahap penyusunan. Oleh karena itu, Renstra SKPD 2016 – 2021 juga belum dapat disusun sehingga Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga belum menyusun RKPD Tahun 2017.

Oleh karena itu usulan program/kegiatan Badan Kesbangpol tahun 2017 belum dapat dibandingkan dengan RKPD tahun 2017, dan yang ditampilkan hanya hasil analisis kebutuhan saja sebagai berikut :

No	Usulan Program/Kegiatan Dalam Rancangan RKPD Tahun 2017	Hasil Analisis Kebutuhan	Ket
I	-	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	
1		Penyediaan jasa surat menyurat	
2		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	
3		Penyediaan jasa kebersihan kantor	
4		Penyediaan alat tulis kantor	
5		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	
7		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
8		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	
9		Penyediaan makan dan minum	
10		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan	



11		luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	
II		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
1		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	
2		Pengadaan mebeleur	
3		Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	
4		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio, komunikasi dan informasi	
5		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
6		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
7		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	
8		Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset	
III		Program peningkatan disiplin aparatur	
1		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	
IV		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
1		Bimbingan teknis implementasi peraturan	



V		perundang undangan	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan SKPD	
2		Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	
3		Penatausahaan keuangan SKPD	
VI		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	
1		Monitoring penanganan masalah strategis daerah	
2		Monitoring dan pemantauan orang asing	
3		Pengawasan dan pencegahan konflik sosial	
4		Pengawasan dan peningkatan kewaspadaan dini di daerah	
5		Pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi/ ijin penelitian	
6		Optimalisasi pelaksanaan tim terpadu penanganan konflik sosial	
7		Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan kesbangpol	
8		Rapat koordinasi ketahanan ekonomi dan sosial budaya	



9		Sumatera Barat	
10		Pengawasan dan pencegahan terorisme di daerah	
11		Pemantauan demonstrasi, penanganan bencana alam, dan peringatan hari hari besar keagamaan	
12		Pengawasan ipoleksosbudhankam di daerah	
13		Sosialisasi SKB 3 Menteri dan Kepgub Sumbar Nomor 17 Tahun 2011 tentang larangan JAI	
		Optimalisasi Pusat Komunikasi dan Informasi di Daerah	
VII	-	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	
1		Forum pemantapan wawasan kebangsaan	
2		Sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa	
3		Penguatan wawasan bela negara	
4		Sosialisasi pewarisan nilai nilai luhur bangsa	
5		Penguatan forum pembauran kebangsaan	



6		Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	
7		Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wasbang	
8		Penguatan pusat pendidikan kebangsaan	
9		Sosialisasi penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat	
10		Pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan FKUB	
11		Penguatan pusat pendidikan kebangsaan	
12		Seminar bela negara	
VII	-	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	
1		Pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	
2		Pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat	
3		Peringatan Hari Anti Narkotika (HANI) di Provinsi Sumatera Barat	

VIII	-	Program pendidikan politik masyarakat	
1		Forkomkon jajaran kesbangpol provinsi dan kab/kota di Sumatera Barat	
2		Monitoring dan evaluasi program serta rapat kerja bidang kesbangpol,	
3		Fasilitasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	
4		Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	
5		Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilukada	
6		Bintek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik	
7		Sosialisasi dan pembinaan ormas	
8		Sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik	
9		Dialog politik bersama parpol, ormas dan tokoh masyarakat kab/kota	

Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, maka terjadi perubahan yang sangat mendasar pada struktur kesbangpol di provinsi maupun kabupaten/kota, juga dalam penanganan urusan. Hal ini tentu saja banyak berpengaruh dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2017.

Proses perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak dapat dilakukan karena pada saat penyusunan rancangan Renja 2017, rancangan awal RKPD belum diterima.

b) Langkah langkah Yang Dilakukan

1. Tetap menjalankan tugas dan fungsi kesbangpol di Sumatera Barat secara maksimal dengan dukungan dana APBD yang telah dialokasikan dalam DPA Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2016, sebelum terbentuknya instansi vertikal di Sumatera Barat yang membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dini dan deteksi dini melalui pemetaan daerah rawan konflik sosial, terorisme, penyakit masyarakat, pengawasan lembaga/orang asing dan pemetaan daerah rawan bencana sebagai amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/969/SJ tanggal 24 Februari 2015 tentang pemberdayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah dalam rangka menjaga stabilitas daerah.
3. Melakukan perubahan pada nomenklatur Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Provinsi menjadi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi melalui Keputusan Gubernur.
4. Mendukung terbentuknya kelompok kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/618/SJ tanggal 4 Februari 2015 tentang Pelaksanaan Demokrasi di Daerah.
5. Menerbitkan laporan harian Badan Kesbangpol Prov. Sumbar berkaitan dengan aspek aspek kewaspadaan dini serta permasalahan lainnya yang berpotensi menimbulkan instabilitas di daerah.
6. Mengoptimalkan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Dapat dijelaskan pula bahwa proses penyusunan Renja SKPD 2017 tidak didasarkan pada rancangan awal RKPD karena rancangan awal tersebut belum diterima oleh Badan Kesbangpol.

Adapun usulan program/kegiatan Badan Kesbangpol tahun 2017 adalah merupakan kegiatan lanjutan. Sedangkan satu kegiatan baru adalah Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

c) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat



Ketika proses penyusunan Renja SKPD 2017 dilakukan, belum diterima usulan program/kegiatan masyarakat/pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol adalah untuk mendukung Misi 1 dan Misi 2 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, sebagai berikut:

Misi 1

**MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS,
AGAM AIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN
FALSAFAH ABS - SBK**

Perwujudan misi ini merupakan landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau yang dijadikan syarat untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya.

Misi 2

**MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK,
BERSIH DAN PROFESIONAL**

Strategi dan arah kebijakan.

Untuk mencapai misi 1 pemerintah provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol, diperlukan strategi menekan terjadinya perbuatan maksiat, yakni dengan melakukan fasilitasi pengawasan terhadap pelanggaran perbuatan maksiat, sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	Terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan agama dalam tata kehidupan masyarakat	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Menekan terjadinya perbuatan maksiat	Fasilitasi pengawasan terhadap pelanggaran perbuatan maksiat

Untuk mencapai misi 2, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah menjalankan tiga program urusan dan kegiatan kegiatannya yaitu : Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, dan program pendidikan politik masyarakat.

Kebijakan Nasional Terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Penyusunan rancangan Renja Tahun 2017 Badan Kesbangpol juga berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

Sesuai dengan buku III Rancangan Awal RPJMN 2015 – 2019 tentang Agenda Pembangunan Wilayah, pada bab 8 Arah Pengembangan Wilayah Sumatera poin 8.5.1 tentang Pengembangan Kawasan Strategis tugas dan fungsi Kesbangpol berkaitan dengan poin ke 2 yaitu Perwujudan Kota Layak Huni Yang Aman dan Nyaman, melalui peningkatan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan konflik.

Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menyikapi edaran tersebut, Badan Kesbangpol telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015.

Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya pencegahan konflik sosial, penghentian dan pemulihan pasca konflik di Sumatera Barat.

B Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol

➤ Tujuan

Pencapaian tujuan umum program dan kegiatan Badan Kesbangpol Prov. Sumatera Barat direncanakan dalam waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan visi dan misi serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Secara spesifik, dan sesuai dengan kewenangan yang ada di provinsi maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

- Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya, suku, ras dan agama
- Tercapainya pembinaan politik dalam masyarakat
- Terciptanya upaya pemberantasan penyakit masyarakat

➤ Sasaran

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan dengan indikator yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra 2010 -2015.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah :

- Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Meningkatnya pembauran kebangsaan dalam masyarakat dan generasi muda.
- Sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penyakit masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol didasarkan kepada Peraturan Gubernur Sumbar No 35 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol. Tujuan dan sasaran ini merupakan pedoman dalam menjalankan kebijakan dan strategi terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Prov. Sumbar. Isu penting penyelenggaraan tugas Badan Kesbangpol meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Mendukung terciptanya stabilitas daerah Sumatera Barat dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran Kesbangpol dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.
- Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini aparaturnya Kesbangpol melalui pemetaan :
 - Daerah rawan konflik sosial
 - Isu terorisme (mewaspada kelompok radikal seperti ISIS dan lainnya)
 - Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat
 - Pengawasan terhadap orang atau lembaga asing
 - Serta daerah rawan bencana
- Mensinergikan perbedaan visi dan misi serta langkah dan sikap antar jajaran Kesbangpol pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui rapat kerja dan sosialisasi serta sinkronisasi kelembagaan, dalam upaya mencegah berkembangnya isu-isu gangguan keamanan di Sumatera Barat.

- Membentuk dan memberdayakan forum forum atau tim penanganan masalah bidang kesbangpol di kabupaten/kota seperti :
 - Tim penanganan masalah strategis daerah
 - Tim pengawasan orang asing
 - Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat
 - Tim penelitian/verifikasi bantuan keuangan partai politik (khusus tingkat provinsi)
 - Forum kerukunan umat beragama
 - Forum kewaspadaan dini masyarakat
 - Forum pembauran kebangsaan
 - Forum koordinasi dan pencegahan terorisme
 - Kelompok kerja Indek Demokrasi Indonesia

C Program dan Kegiatan Tahun 2017

1) Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

Program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2016 disusun berdasarkan dokumen RPJMD 2010 - 2015, Renstra Badan Kesbangpol 2010 - 2015 serta memperhatikan Rancangan Awal RPJMN 2015 - 2019.

Perumusan program dan kegiatan tahun 2017 juga mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

- Masih rendahnya capaian target kinerja program program urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dalam mewujudkan misi 1 dan misi 2 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
- Upaya pengerahan segenap potensi dan sumber daya di Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan deteksi dini meliputi aspek aspek daerah rawan konflik sosial, isu terorisme, penyakit masyarakat, pengawasan orang/lembaga asing dan pemetaan daerah rawan bencana.
- Sebagai tindak lanjut dari surat dan edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pemberdayaan Badan Kesbangpol di daerah dan pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial di Sumatera Barat.
- Dinamika kehidupan sosial politik dan keamanan yang terus berkembang ditengah masyarakat yang memerlukan penanganan dengan cepat dan tepat.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Lokasi kegiatan	Anggaran
----	------------------	-------------------	--------	-----------------	----------



	Belanja Langsung				5.556.000.000
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				898.550.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	4.000 surat	Kesbang pol	14.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Kesbang pol	168.000.000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan bahan bahan kebersihan	12 bulan	Kesbang pol	100.000.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Badan Kesbangpol	38 jenis ATK	Kesbang pol	30.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan ganda Badan Kesbangpol	10 jenis barang cetakan	Kesbang pol	40.000.000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan Badan Kesbangpol	10 jenis barang	Kesbang pol	8.000.000
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis barang	Kesbang pol	10.000.000
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Tersedianya bahan bacaan	9 jenis bahan bacaan	Kesbang pol	20.000.000
9	Penyediaan makan dan minum	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 bulan	Kesbang pol	10.000.000
10	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	19 kab/kota di Sumbar dan ke luar daerah	Kesbang pol	338.550.000
11	Penyediaan jasa sopir kantor	Tersedianya jasa sopir kantor	1 org sopir kantor	Kesbang pol	30.000.000



12	Penyediaan jasa pengaman kantor	Tersedianya jasa pengaman kantor	4 orang sopir	Kesbang Pol	130.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				831.950.000
1	Pengadaan kendaraan dinas	Tersedianya kendaraan dinas	1 unit	Kesbang pol	400.000.000
2	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Tersedianya komputer dan perlengkapannya	10 unit	Kesbang pol	10.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit gedung	Kesbang pol	20.000.000
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 unit gedung	Kesbang pol	300.000.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	3 unit mobil dan 2 unit motor	Kesbang pol	50.000.000
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis barang	Kesbang pol	9.000.000
7	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan perlengkapannya	12 bulan	Kesbang pol	10.000.000
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio, komunikasi dan informasi	Terlaksananya pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi	12 bulan	Kesbang pol	3.000.000
9	Pengelolaan,	Terlaksananya	12 bulan	Kesbang	29.950.000



	pengawasan dan pengendalian aset SKPD	pengelolaan pengawasan dan pengendalian aset SKPD		pol	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				29.700.000
1	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian	55 stel	Kesbang pol	29.700.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				40.000.000
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementas peraturan perundangan	1 tahun	Kesbang pol	40.000.000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				160.800.000
1	Penatausahaan keuangan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan Badan Kesbangpol	12 bulan	Kesbang pol	132.000.000
2	Perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya pengelolaan perencanaan dan penganggaran Badan Kesbangpol yang baik	1 tahun anggaran	Kesbang pol	17.250.000
3	Penyusunan laporan ikhtisar capaian kinerja dan keuangan SKPD	Tersusunnya pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	1 tahun anggaran	Kesbang pol	11.550.000



VI	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				850.000.000
1	Monitoring penanganan masalah strategis di daerah	Terlaksananya monitoring, rapat koordinasi dan rapat tim Kominda	12 kali rapat tim Kominda dan 1 kali rakor Kominda	19 kab/kota di Sumbar	200.000.000
2	Monitoring dan pemantauan orang asing	Terlaksananya monitoring dan rapat tim pengawasan orang asing serta terhimpunnya data keberadaan orang asing di Sumbar	4 kali rapat tim pengawasan orang asing	19 kab/kota di Sumbar	50.000.000
3	Pengawasan dan pencegahan konflik sosial di daerah	Terlaksananya pengawasan dan pencegahan konflik sosial	1 tahun	19 kab/kota di Sumbar	50.000.000
4	Pengawasan dan peningkatan kewaspadaan dini di daerah	Terlaksananya peningkatan kewaspadaan dini masyarakat	4 kali rapat tim FKDM	19 kab/kota di Sumbar	125.000.000
5	Rapat koordinasi ketahanan ekonomi dan sosial budaya	Terlaksananya rapat koordinasi ketahanan ekonomi sosial budaya	12 bulan	Padang	75.000.000
6	Optimalisasi pelaksanaan tim terpadu penanganan konflik sosial	Terlaksananya monitoring dan tersedianya data tentang potensi dan upaya penghentian konflik	1 buah dokumen	19 kab/kota di Sumbar	200.000.000
7	Pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi/ijin penelitian	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan penerbitan rekomendasi/ijin	1 buah dokumen rencana aksi	Sumbar	50.000.000



8	Pengawasan dan pencegahan terorisme di daerah	penelitian Terlaksananya pengawasan dan pencegahan terorisme di daerah	12 bulan	19 kab/kota di Sumbar	50.000.000
9	Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan kesbangpol	Terlaksananya sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan kesbangpol	1 kali sosialisasi	Bukit tinggi	50.000.000
VII	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				1.047.000.000
1	Sosialisasi dan penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat	1 kali	Sumbar	50.000.000
2	Forum pemantapan wawasan kebangsaan	Terlaksananya forum pemantapan wawasan kebangsaan	1 kali	Sumbar	56.000.000
3	Sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa	Terlaksananya sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa	1 kali	Sumbar	65.000.000
4	Pembinaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama di Sumbar	1 kali	Sumbar	120.000.000
5	Penguatan wawasan bela negara	Terlaksananya pembekalan bela negara	1 kali pembekalan	Sumbar	70.000.000
6	Sosialisasi pewarisan	Terlaksananya	1 kali	Sumbar	70.000.000



	nilai nilai luhur bangsa	sosialisasi pewarisan nilai luhur bangsa			
7	Penguatan forum pembauran kebangsaan	Terlaksananya forum pembauran kebangsaan	19 kabupaten/kota	Sumbar	60.000.000
8	Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wasbang	Terwujudnya pemantapan program kerja ideologi dan wasbang	8 kabupaten/kota	Sumbar	41.000.000
9	Penguatan pusat pendidikan kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi penguatan pusat pendidikan kebangsaan	1 kali sosialisasi	Sumbar	65.000.000
10	Seminar bela negara	Terlaksananya seminar bela negara	1 kali seminar	Sumbar	100.000.000
11	Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Terlaksananya penguatan kelompok kerja IDI	1 kali	Sumbar	350.000.000
VIII	Program Pendidikan Politik Masyarakat				948.000.000
1	Forkomkon jajaran kesbangpol provinsi dan kab/kota di Sumbar	Terlaksananya rapat koordinasi di jajaran kesbangpol se-Sumbar	1 kali	Padang	50.000.000
2	Monitoring dan evaluasi program serta rapat kerja kesbangpol provinsi dengan kab/kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta raker di jajaran kesbangpol prov dgn kab/kota	1 buah buku laporan dan 4 kali pertemuan	Sumbar	130.000.000
3	Fasilitasi PAW anggota DPRD kab/kota di Sumbar	Terlaksananya rapat pembahasan dalam rangka fasilitasi PAW anggota DPRD kab/kota	8 kali sidang tim	Padang	50.000.000
4	Pengelolaan bantuan	Terlaksananya	12 kali	Padang	58.000.000



	keuangan partai politik	pemberian rekomendasi bantuan keuangan	sidang tim		
5	Bintek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik	Terlaksananya bintek pengajuan bantuan keuangan parta politik	1 kali	Padang	70.000.000
6	Sosialisasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan ormas	1 kali	Kab/kota di Sumbar	70.000.000
7	Sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik	Terlaksananya sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik	1 kali	Padang	70.000.000
8	Dialog politik bersama partai politik, ormas dan tokoh masyarakat	Terlaksananya dialog politik bersama partai politik, ormas dan tokoh masyarakat	4 kali	Kab/kota di Sumbar	250.000.000
9	Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilukada	Terlaksananya pemantauan tahapan pemilukada	2 kali	Kab/kota di Sumbar	200.000.000
IX	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat				750.000.000
1	Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	Terlaksananya fasilitasi peringatan HANI tahun 2017.	1 kali	Padang	50.000.000
2	Pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat	Terlaksananya pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat.	1 kali	Padang	50.000.000
3	Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba	1 kali	Padang	650.000.000

Usulan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Tahun 2017 adalah sebanyak 9 program yang terdiri dari 5 program pokok dan 4 program urusan. Kegiatan yang diusulkan adalah sebanyak 58 kegiatan yang terdiri dari 26 kegiatan pokok dan 32 kegiatan urusan. Total alokasi anggaran yang diusulkan adalah sebesar Rp. 5.556.000.000,- (Lima milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah).

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka urusan kesatuan bangsa dan politik didaerah menjadi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur bersama Bupati/Walikota selaku wakil pemerintah pusat dibantu oleh sebuah instansi vertikal.

3. Sebelum terbentuknya instansi vertikal di Sumatera Barat, urusan pemerintahan umum dikerjakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas tugas bidang kesatuan bangsa dan politik di Sumatera Barat.
4. Program program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah sebanyak 5 program belanja langsung pokok 4 program belanja langsung urusan.
5. Untuk rencana kerja tahun 2017, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah merencanakan akan melaksanakan 5 program belanja langsung pokok (terdiri dari 26 kegiatan) dan 4 program belanja langsung urusan (terdiri dari 32 kegiatan).
6. Program program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2017 adalah berdasarkan kepada Rencana Strategis Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Sumbar Tahun 2010 - 2015, yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov. Sumbar Tahun 2010 - 2015.
7. Rancangan Badan Kesbangpol akan dilakukan penyesuaian berdasarkan skala prioritas dan pagu dana dalam penyusunan RKPD, KUA PPAS sampai disusunnya APBD.

8. Sebagai tindak lanjut, rancangan Renja Badan Kesbangpol akan disesuaikan dengan RKPD dan ditetapkan menjadi KUA PPAS dan APBD Badan Kesbangpol Tahun 2017.

Demikianlah rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 ini dibuat, sebagai bagian dari rencana kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan harapan dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

Padang,

2016

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT**



ZUL ALIMAN, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19590308 198110 1 001

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN\	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1 19									
1 19 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				3,906,000,000				7,090,000,000
1 19 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				898,550,000				1,180,000,000
1 19 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya proses surat menyurat	Kesbangpol	- 12 bulan	14,000,000	APBD		- 12 bulan	25,000,000
1 19 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kesbangpol	- 12 bulan	168,000,000	APBD		- 12 bulan	200,000,000
1 19 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Kesbangpol	- 12 bulan	100,000,000	APBD		- 12 bulan	150,000,000
1 19 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kesbangpol	- 12 bulan	30,000,000	APBD		- 12 bulan	50,000,000
1 19 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kesbangpol	- 12 bulan	40,000,000	APBD		- 12 bulan	60,000,000
1 19 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	Kesbangpol	- 12 bulan	8,000,000	APBD		- 12 bulan	10,000,000

1	19	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kesbangpol	- 12 bulan	10,000,000	APBD	- 12 bulan	50,000,000
1	19	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Kesbangpol	- 12 bulan	20,000,000	APBD	- 12 bulan	35,000,000
1	19	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Kesbangpol	- 12 bulan	10,000,000	APBD	- 12 bulan	25,000,000
1	19	01	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kesbangpol	- 12 bulan	338,550,000	APBD	- 12 bulan	400,000,000
1	19	01	01	22	Penyediaan jasa sopir kantor	Terlaksananya penyediaan jasa sopir kantor	Kesbangpol	- 12 bulan	30,000,000	APBD	- 12 bulan	35,000,000
1	19	01	01	24	Penyediaan jasa pengaman kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pengaman kantor	Kesbangpol	- 12 bulan	130,000,000	APBD	- 12 bulan	140,000,000
1	19	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				131,950,000			165,000,000
1	19	01	02	15	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Kesbangpol	- 12 bulan	10,000,000	APBD	- 12 bulan	20,000,000
1	19	01	02		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	Kesbangpol	- 12 bulan	20,000,000	APBD	- 12 bulan	20,000,000
1	19	01	02	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio, komunikasi dan informasi	Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Kesbangpol	- 12 bulan	3,000,000	APBD	- 12 bulan	5,000,000
1	19	01	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ops	Kesbangpol	- 12 bulan	50,000,000	APBD	- 12 bulan	50,000,000
1	19	01	02	25	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Kesbangpol	- 12 bulan	9,000,000	APBD	- 12 bulan	15,000,000
1	19	01	02	29	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan pengawasan aset SKPD	Kesbangpol	- 12 bulan	29,950,000	APBD	- 12 bulan	35,000,000

1	19	01	02		Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan kelengkapannya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer	Kesbangpol	- 12 bulan	10,000,000	APBD	- 12 bulan	20,000,000
1	19	01	03		Program Peningkatan Displin Aparatur				29,700,000			35,000,000
1	19	01	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas bagi PNS	Kesbangpol	- 12 bulan	29,700,000	APBD	- 12 bulan	35,000,000
1	19	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				40,000,000			75,000,000
1	19	01	05	02	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Terlaksananya bintek keuangan, aset dan program	Kesbangpol	- 12 bulan	40,000,000	APBD	- 12 bulan	75,000,000
1	19	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				160,800,000			195,000,000
1	19	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Kesbangpol	- 12 bulan	132,000,000	APBD	- 12 bulan	150,000,000
1	19	01	06	03	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Kesbangpol	- 12 bulan	17,250,000	APBD	- 12 bulan	25,000,000
1	19	01	06	05	Penatausahaan keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD	Kesbangpol	- 12 bulan	11,550,000	APBD	- 12 bulan	20,000,000
1	19	01	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				850,000,000			1,800,000,000
1	19	01	15		Monitoring penanganan masalah strategis daerah	Terlaksananya rapat koordinasi penanganan masalah strategis daerah dan rapat tim	Sumbar	- 12 kl rapat - 1 kl rakor	200,000,000	APBD	- 12 kl rapat - 1 kl rakor	300,000,000
1	19	01	15		Monitoring pemantauan orang asing	Terlaksananya monitoring pemantauan orang asing dan terhimpunnya data keberadaan orang asing di Sumbar	Sumbar	- 4 kl rapat	50,000,000	APBD	- 4 kl rapat	200,000,000

1	19	01	15		Pengawasan pencegahan konflik sosial di daerah	Terlaksananya pengawasan pencegahan konflik sosial di daerah	Sumbar	- 1 buku/ dokumen	50,000,000	APBD		- 1 buku/ dokumen	150,000,000
1	19	01	15		Pengawasan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat di daerah	Terlaksananya pengawasan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat	Sumbar	- 1 buku/ dokumen	125,000,000	APBD		- 1 buku/ dokumen	200,000,000
1	19	01	15		Koordinasi dan rakor ketahanan ekonomi dan sosial budaya di Sumbar	Terlaksananya koordinasi ketahanan ekonomi budaya	Sumbar	- kab/kota di Sumbar	75,000,000	APBD		- kab/kota di Sumbar	60,000,000
1	19	01	15		Optimalisasi pelaksanaan tim terpadu penanganan konflik sosial	Terlaksananya optimalisasi pelaksanaan tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah	Sumbar	- 1 buah dokumen	200,000,000	APBD		- 1 buah dokumen data gangguan keamanan	500,000,000
1	19	01	15		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian	Terlaksananya pemantauan kegiatan bagi mahasiswa masyarakat yang melakukan penelitian	Sumbar	- 12 bulan	50,000,000	APBD		- 12 bulan	120,000,000
1	19	01	15		Pengawasan dan pencegahan terorisme di daerah	Terdatanya informasi potensi terorisme dan aksi terorisme di kab/kota	Sumbar	- 12 bulan	50,000,000	APBD		- 12 bulan	150,000,000
1	19	01	15		Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan kesbangpol	Terlaksananya sosialisasi sinkronisasi kelembagaan	Sumbar	- 1 kali	50,000,000	APBD		- 1 kali	120,000,000
1	19	01	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				747,000,000				1,390,000,000
1	19	01	18	01	Sosialisasi dan penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi penanganan organisasi aliran kepercayaan	Sumbar	- 1 kali	50,000,000	APBD		- 19 kab/kota	150,000,000

1	19	01	18	02	Forum pemantapan wawasan kebangsaan	Terlaksananya forum pemantapan wawasan kebangsaan	Sumbar	- 1 kali	56,000,000	APBD	- 1 kali	150,000,000
1	19	01	18	03	Sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa	Terlaksananya sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa bagi tokoh masy, agama, ormas/LSM dan generasi muda	Sumbar	- 1 kali	65,000,000	APBD	- 1 kali	120,000,000
1	19	01	18	04	Pembinaan dan kerukunan umat beragama di Sumbar	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi kerukunan umat beragama di Sumatera Barat	Sumbar	- 19 kab/kota	120,000,000	APBD	- 19 kab/kota	140,000,000
1	19	01	18	06	Sosialisasi pewarisan nilai nilai luhur bangsa	Terlaksananya sosialisasi pewarisan nilai nilai luhur bangsa	Sumbar	- 1 kali	70,000,000	APBD	- 1 kali	120,000,000
1	19	01	18	07	Penguatan wawasan bela negara	Terlaksananya peningkatan wawasan bela negara	Sumbar	- 1 kali	70,000,000	APBD	- 1 kali	120,000,000
1	19	01	18	08	Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wasbang	Meningkatnya capaian pelaksanaan program di bidang ideologi dan wasbang	Sumbar	- 1 kali	41,000,000	APBD	- 1 kali	100,000,000
1	19	01	18	10	Penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	Terlaksananya rapat kelompok kerja dan sosialisasi penguatan pusat pendidikan kebangsaan bagi aparatur kesbang prov dan kab/ kota se-Sumbar	Sumbar	- 1 kali	65,000,000	APBD	- 1 kali	120,000,000
1	19	01	18		Penguatan forum pembauran kebangsaan	Terlaksananya forum pembauran kebangsaan	Sumbar	- 1 kali	60,000,000	APBD	- 1 kali	120,000,000

1	19	01	18		Seminar bela negara	Terlaksananya seminar bela negara	Sumbar	- 1 kali	100,000,000	APBD	- 1 kali	250,000,000
1	19	01	18		Penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Terlaksananya penguatan bagi aparatur dan anggota Pokja IDI	Sumbar	- 1 kali	50,000,000	APBD	- 1 kali	150,000,000
1	19	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat				100,000,000			400,000,000
1	19	01	20	01	Koordinasi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Sumbar (HANI)	Terlaksananya upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui peringatan HANI	Sumbar	- 1 kali	50,000,000	APBD	- 1 kali	200,000,000
1	19	01	20	02	Pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat	Terlaksananya pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat	Sumbar	- 1 kali	50,000,000	APBD	- 1 kali	200,000,000
1	19	01	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat				948,000,000			1,850,000,000
1	19	01	21	01	Forkomkon jajaran kesbangpol provinsi dan kab/kota di Sumbar	Terlaksananya rapat koordinasi jajaran kesbangpol linmas provinsi dan kab/kota di Sumbar	Sumbar	- 1 kali	50,000,000	APBD	- 1 kali	100,000,000
1	19	01	21	02	Monitoring dan evaluasi program serta rapat kerja kesbangpol provinsi dan kab/kota di Sumbar	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program serta rapat kerja kesbangpol se-Sumatera barat	kab/kota di Sumbar	- 1 laporan - 4 raker	130,000,000	APBD	- 1 laporan - 4 raker	250,000,000
1	19	01	21	03	fasilitasi PAW anggota DPRD kab/kota di Sumbar	Terlaksananya fasilitasi penggantian antar waktu anggota DPRD kab/kota di Sumbar	kab/kota di Sumbar	- 8 kali sidang tim	50,000,000	APBD	- 10 kali sidang tim	120,000,000

1	19	01	21	04	pengelolaan bantuan keuangan partai politik	Terlaksananya pembahasan bantuan keuangan parpol	Sumbar	- 12 kali sidang tim	58,000,000	APBD	- 12 kali sidang tim	120,000,000
1	19	01	21	05	Bintek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik	Meningkatnya wawasan pimpinan parpol dan aparatur dalam proses pengajuan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik	Sumbar	- 1 kali	70,000,000	APBD	- 1 kali	120,000,000
1	19	01	21	06	Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Pemilukada	Terlaksananya fasilitasi Pemilukada di 13 kab/kota dan 1 prov dengan aman tertib dan lancar	Sumbar	- 2 kali pembahasan	200,000,000	APBD	- 2 kali pembahasan	500,000,000
1	19	01	21	07	Sosialisasi dan pembinaan ormas	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan ormas	Sumbar	- 1 kali	70,000,000	APBD	- 1 kali	120,000,000
1	19	01	21	08	sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik	Terlaksananya sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik	Sumbar	- 1 kali	70,000,000	APBD	- 1 kali	120,000,000
1	19	01	21	09	Dialog politik bersama partai politik, ormas dan tokoh masyarakat	Terlaksananya dialog politik bersama partai politik ormas dan tokoh masyarakat	Sumbar	- 4 kab/kota	250,000,000	APBD	- 4 kab/kota	400,000,000

**Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

ZUL ALIMAN, SE, MM
Pembina Tk. I
Nip. 19590308 198110 1 001